



# BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2016

**NOMOR : LAKIP- 2/PW16/6/2017**  
**TANGGAL : 4 JANUARI 2017**



# KATA PENGANTAR



Tahun 2016 merupakan tahun kedua Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah disusun sebagai bagian dari Renstra BPKP. Tahun 2016 juga merupakan tantangan karena adanya penurunan anggaran, namun hal ini tidak mengubah

target kinerja yang ditetapkan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.

Menjawab tantangan tersebut Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berkonsultasi dengan BPKP Pusat baik Kedeputan maupun Kesesmaan dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah Sewilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Fokus pengawasan intern yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan meliputi perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi, peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

Laporan kinerja disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Laporan kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan media akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan serta penggunaan anggaran dalam menjalankan

peran pengawasan intern. Keberhasilan pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan integrasi kinerja seluruh bidang dan bagian di Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dan kinerja individu pegawai yang saling berkaitan.

Segenap ide, gagasan, pandangan, dan upaya terbaik telah dicurahkan dalam Tahun 2016 oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari BPKP dalam menjawab tantangan menjalankan tugas dan fungsinya dengan hasil akhir kinerja yang tertuang dalam laporan ini.



Kepala Perwakilan,

Muhammad Masykur

# DAFTAR ISI

---

| <u>Uraian</u>                     | <u>Halaman</u> |
|-----------------------------------|----------------|
| Kata Pengantar                    | i              |
| Daftar Isi                        | iii            |
| Daftar Tabel                      | iv             |
| Daftar Gambar                     | v              |
| Daftar Diagram                    | vi             |
| Ikhtisar Eksekutif                | viii           |
| BAB I - PENDAHULUAN               | 1              |
| A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang    | 1              |
| B. Aspek Strategis Organisasi     | 7              |
| C. Kegiatan dan Produk Organisasi | 9              |
| D. Struktur Organisasi            | 10             |
| E. Sistematika Penyajian          | 14             |
| BAB II – PERENCANAAN KINERJA      | 16             |
| A. Rencana Strategis 2015-2019    | 16             |
| B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016  | 21             |
| BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA   | 24             |
| A. Capaian Kinerja Organisasi     | 25             |
| Sasaran Program 1                 | 27             |
| Sasaran Program 2                 | 33             |
| Sasaran Program 3                 | 39             |
| Sasaran Program 4                 | 45             |
| B. Realisasi Keuangan             | 46             |
| BAB IV – PENUTUP                  | 48             |
| Lampiran - lampiran               |                |

# DAFTAR TABEL

---

| <u>Uraian</u>   | <u>Halaman</u> |
|---|----------------|
| Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan                                   | 12             |
| Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan                         | 12             |
| Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai                              | 13             |
| Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan                                  | 13             |
| Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Sasaran Program                             | 19             |
| Tabel 2.2 Program dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi<br>Kalimantan Selatan | 20             |
| Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2016                                       | 22             |
| Tabel 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2016                                 | 25             |

# DAFTAR GAMBAR

---

| <u>Uraian</u>                       | <u>Halaman</u> |
|-------------------------------------|----------------|
| Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP | 9              |
| Gambar 1.2 Struktur Organisasi      | 11             |
| Gambar 1.3 Sistematika Penyajian    | 15             |

# DAFTAR DIAGRAM

---

| <u>Uraian</u>   | <u>Halaman</u> |
|---|----------------|
| Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan   | 12             |
| Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan   | 13             |
| Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai  | 13             |
| Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan  | 14             |
| Diagram 3.1 Capaian Sasaran Program 1   | 27             |
| Diagram 3.2 Perbandingan Realisasi Sasaran Program 1 terhadap Target Renstra 2015-2019                                | 28             |
| Diagram 3.3 Capaian Realisasi Sasaran Program 2   | 34             |
| Diagram 3.4 Capaian Realisasi Sasaran Program 3   | 40             |
| Diagram 3.5 Perbandingan Realisasi IKU 1 Sasaran Program 2 terhadap Target Renstra 2015-2019                          | 42             |
| Diagram 3.6 Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Program 3 terhadap Target Renstra 2015-2019 (tahapan level 2)        | 43             |
| Diagram 3.7 Perbandingan Realisasi IKU 2 Sasaran Program 3 terhadap Target Renstra 2015-2019 (tahapan menuju level 3) | 43             |
| Diagram 3.8 Capaian Realisasi dibanding Target Tahun 2016 IKU 3 Sasaran Program 3                                     | 44             |
| Diagram 3.9 Capaian Realisasi dibanding Target Tahun 2016 IKU 3 Sasaran Program 3                                     | 45             |

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan kegiatan. Dokumen Renstra juga memuat indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta rencana pendanaan dalam tahun 2015-2019, yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Pengawasan (Jakwas) dan Perjanjian Kinerja (Perkin) setiap tahun.

Visi BPKP adalah menjadi Auditor Internal Pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Sebagai Auditor Internal Pemerintah RI, BPKP berperan membantu pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, BPKP menetapkan tiga tujuan strategis yang akan dicapai dalam tahun 2015-2019, yaitu (1) Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif; (2) Peningkatan efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah; dan (3) Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang profesional dan kompeten. Dalam usahanya mencapai tujuan strategis tersebut BPKP telah merumuskan sasaran strategis dan menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai dasar pengukuran kinerja BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bagian dari BPKP telah merumuskan sasaran program dan menetapkan indikator sasaran program sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan strategis BPKP. Target sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016.



Laporan Kinerja (LKj) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja tahun 2016. LKj juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa dari sepuluh indikator kinerja seluruhnya telah tercapai. Ikhtisar capaian tersebut nampak sebagai berikut:

| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA  | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|--------------------------|--|--|--------|--------|-----------|-----------|
| <b>A.</b>                | <b>Sasaran Program</b>   | <b>Indikator Kinerja Program</b>   |        |        |           |           |
| 1.                       | Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi |  |        |        |           |           |
|                          | 1.1  | Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional                     | %      | 45     | 57,14     | 126,98    |
|                          | 1.2  | Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi | %      | 100    | 100,00    | 100,00    |
|                          | 1.3  | Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum  | %      | 60     | 100,00    | 166,67    |
| 2.                       | Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi                                       |  |        |        |           |           |
|                          | 2.1  | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)   | %      | 15     | 15,39     | 102,60    |
|                          | 2.2  | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina                                   | %      | 52     | 76,92     | 147,92    |
|                          | 2.3  | Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina   | %      | 58     | 100,00    | 172,41    |
| 3.                       | Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda   |  |        |        |           |           |
|                          | 3.1  | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)   | %      | 15     | 15,38     | 102,60    |
|                          | 3.2  | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)   | %      | 100    | 100,00    | 100,00    |
|                          | 3.3  | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)   | %      | 30     | 76,92     | 100,00    |
|                          | 3.4  | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)   | %      | 55     | 7,69      | 186,01    |

Uraian capaian sasaran program tersebut adalah:

1. Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara

Pencapaian sasaran program 1 diukur menggunakan tiga IKU yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” terealisasi 57,14% atau 126,98% dari target 45%, “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, dan “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” terealisasi 100% atau 166,67% dari target 60%.

2. Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi

Pencapaian sasaran program 2 diukur menggunakan tiga IKU yaitu “Maturitas SPIP pemerintah kabupaten/kota (level 3)” terealisasi 15,39% atau 102,60% dari target 15%, “Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina” terealisasi 76,92% atau 147,92% dari target 52%, dan “Persentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina” terealisasi 100% atau 172,41% dari target 58%.

3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah

Pencapaian sasaran program 3 diukur menggunakan empat IKU yaitu “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (Level 3)” terealisasi 15,39% atau 102,60% dari target 15%, “Kapabilitas APIP pemerintah provinsi (Level 2)” terealisasi 100% atau 100% dari target 100%, “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (Level 2)” terealisasi 76,92% atau 100% dari target 30%, dan “Kapabilitas APIP pemerintah kabupaten/kota (Level 1)” terealisasi 7,69% atau 186,01% dari target 55%.

Kinerja yang telah mencapai target secara umum didukung oleh BPKP pusat serta kerjasama yang baik dengan mitra kerja dalam meningkatkan

akuntabilitas keuangan negara/daerah serta, peningkatan maturitas SPIP,  
dan kapabilitas APIP.

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

**T**ugas utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah membantu Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta pembangunan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus memberikan masukan bagi penyusunan kebijakan yang terkait. Tugas, fungsi, dan wewenang BPKP, aspek strategis organisasi, kegiatan dan layanan produk BPKP, struktur organisasi dan komposisi pegawai, serta sistematika penyajian Laporan Kinerja Tahun 2016 lebih lanjut diuraikan sebagai berikut.

### **A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang**

Tugas dan fungsi BPKP terakhir diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan dan Keuangan. Berdasarkan Perpres tersebut, BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta

pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah;

3. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
4. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/ badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis;
5. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigasi terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
6. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
7. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
8. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
9. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;

10. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
11. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
12. Pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
14. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Selain itu BPKP berperan sebagai auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden seperti dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Peran BPKP tersebut untuk mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara melalui fungsi :

1. Pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral; kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
2. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.
3. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebelum disampaikan Menteri Keuangan kepada Presiden.
4. Pengawasan ikhtisar laporan hasil pengawasan yang bersifat nasional (dari hasil pengawasan BPKP dan APIP lainnya).

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dalam rangka

meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan efektivitas anggaran pengeluaran negara/ daerah, meliputi:

1. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
2. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Instansi Pemerintah, Badan Hukum lain, dan Wajib Bayar;
3. Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4. Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/ daerah;
5. Audit dan evaluasi terhadap program/kegiatan strategis di bidang kemaritiman, ketahanan energi, ketahanan pangan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan;
6. Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/ daerah;
7. Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian kecurangan yang dapat mencegah, mendeteksi, dan menangkal korupsi;
8. Audit investigatif terhadap penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan dampak pencegahan yang efektif;
9. Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah dan pemberian keterangan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.

Secara khusus kedudukan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal BPKP di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP. Menurut Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral.
2. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara.
3. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan/atau atas permintaan Kepala Daerah.
4. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada wilayah kerjanya.
5. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjalankan fungsi:

1. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
2. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, BUMN/BUMD dan kinerja instansi Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD;
3. Pengawasan terhadap badan usaha milik negara, badan-badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerja sama, dan pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, badan-badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku



kepentingan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
6. Pengawasan intern terhadap perencanaan, dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah;
7. Pemberian konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
8. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
9. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
10. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di

dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

11. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
12. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah;
13. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga Pemerintah Daerah; dan
14. Pelaksanaan dan pelayanan administrasi Perwakilan BPKP.

## **B. Aspek Strategis Organisasi**

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional, yaitu pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern adalah hasil pengawasannya berperan penting dalam meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup nasional.

### **1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP**

Kerangka kebijakan pengawasan BPKP diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah, penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis serta kebijakan penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif. Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci, sebagai berikut :

- a. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern melalui peningkatan IA-CM APIP yang mampu mendorong pemantapan penerapan sistem pengendalian intern kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi (KLPK) dan mampu bersinergi dengan APIP lain dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan dalam melakukan pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
- b. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan sinergis bersama-sama dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi untuk mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di RPJMN 2015-2019;
- c. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah; pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan terhadap alokasi keuangan daerah (dana transfer);
- d. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui *debottlenecking* dan *clearing house*; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

## 2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri atas strategi eksekutif maupun strategi operasional. Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan pembangunan nasional. Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program teknis pengawasan BPKP yaitu Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015-2019 memfokuskan pada peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP, penguatan kapabiliitas APIP, dan penguatan kompetensi sumber daya manusia BPKP.

Secara lebih spesifik strategi untuk mewujudkan visi dan misi adalah melalui program-program induktif, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1 Strategi Pengawasan BPKP



### C. Kegiatan dan Produk Organisasi

BPKP melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan unit eselon II berkewajiban melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan teknis yang dilaksanakan berupa :

1. Pengawasan atas kegiatan lintas sektoral
2. Pengawasan atas permintaan *stakeholders*

3. Pengawasan atas permintaan Presiden
4. Pengawasan atas Proyek PHLN
5. Pembinaan penyelenggaraan SPIP
6. Pembinaan peningkatan kapabilitas APIP
7. Pengawasan atas kegiatan kebendaharaan umum negara
8. Bimbingan teknis/asistensi penyusunan LKKL
9. Pengawasan penerimaan negara
10. Bimtek/asistensi penyusunan LKPD
11. Pengawasan atas kinerja pelayanan publik
12. Bimtek/asistensi GCG/KPI
13. Pengawasan atas kinerja BUMD
14. Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD
15. Sosialisasi masalah korupsi
16. Bimtek/asistensi implementasi FCP
17. Kajian pengawasan
18. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas Permintaan Aparat Penegak Hukum
19. Audit investigasi atas permintaan instansi lainnya
20. Reviu terhadap laporan dan pengaduan masyarakat.
21. Pengawasan Pembangunan Nasional
22. Monitoring BUMDes

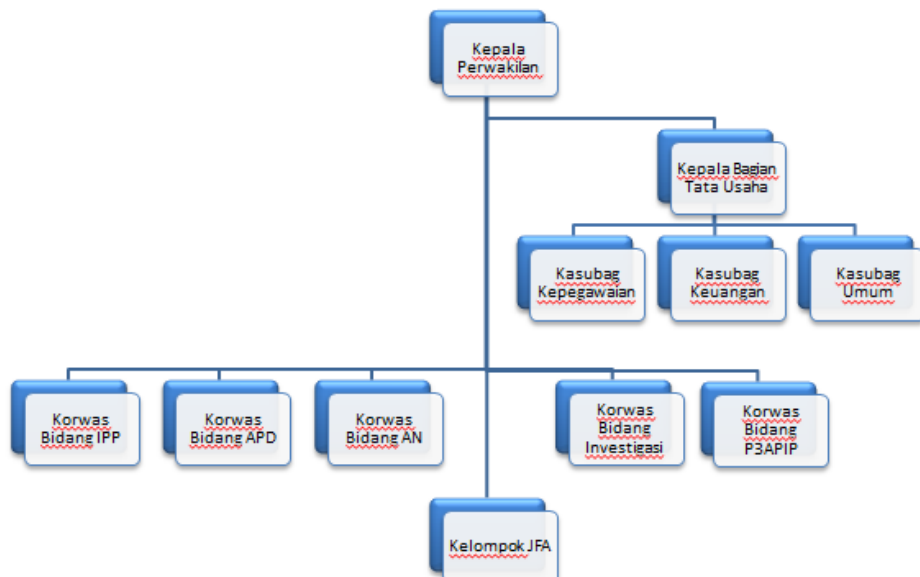
#### **D. Struktur Organisasi**

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan merupakan instansi vertikal di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara,

Provinsi Maluku dan Provinsi Papua. Struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari:

1. Bagian Tata Usaha
  - a) Subbagian Umum
  - b) Subbagian Kepegawaian
  - c) Subbagian Keuangan
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat (IPP)
3. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah (APD)
4. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Akuntan Negara (AN)
5. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan Bidang Investigasi
6. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP (P3A)

Gambar 1.2 Struktur Organisasi



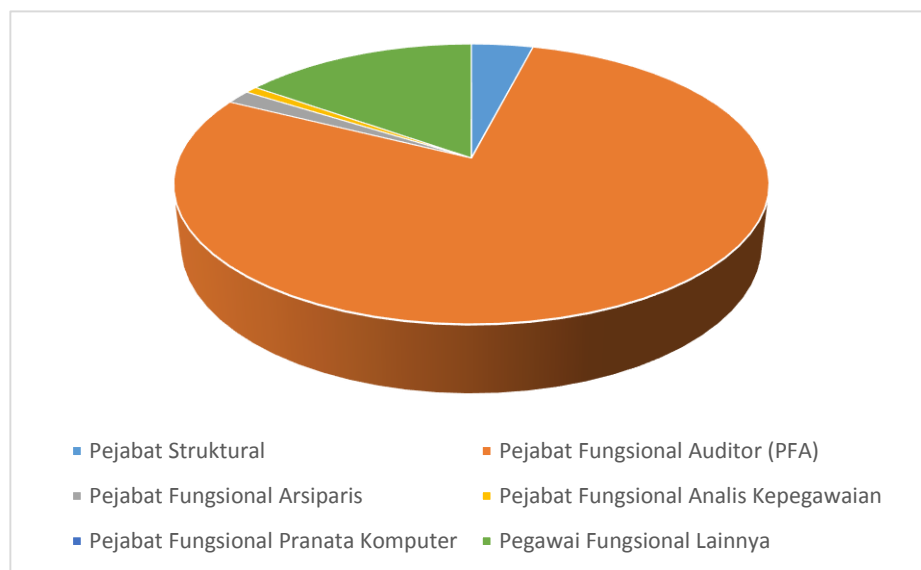
Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh seorang Kepala, yakni Muhammad Masykur berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-285/K/SU/2016 tanggal 31 Agustus 2016.

Sumber Daya Manusia (SDM) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2016 sebanyak 125 orang, terdiri atas :

Tabel 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

| Jabatan                                 | Tahun 2016 |               |
|---|------------|---------------|
|   | Orang      | %             |
| Pejabat Struktural                      | 5          | 4,00          |
| Pejabat Fungsional Auditor (PFA)        | 98         | 78,40         |
| Pejabat Fungsional Arsiparis            | 2          | 1,60          |
| Pejabat Fungsional Analisis Kepegawaian | 1          | 0,80          |
| Pejabat Fungsional Pranata Komputer     | 0          | 0,00          |
| Pegawai Fungsional Lainnya              | 19         | 15,20         |
| <b>Jumlah</b>                           | <b>125</b> | <b>100,00</b> |

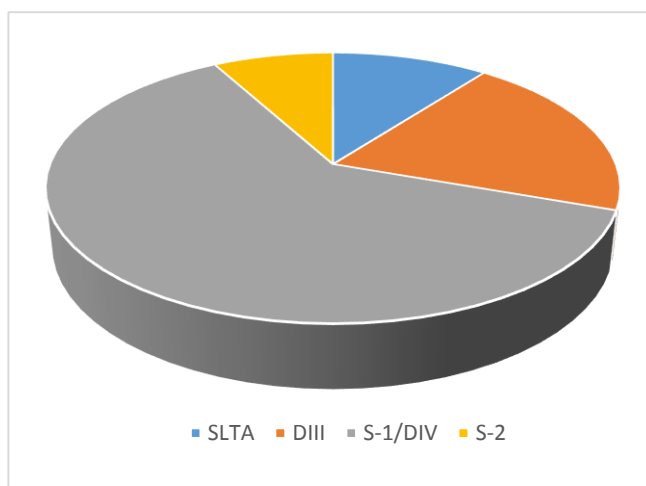
Diagram 1.1 Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan



Tabel 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan

| Strata Pendidikan | Tahun 2016 |               |
|-------------------|------------|---------------|
|                   | Orang      | %             |
| SLTA              | 13         | 10,40         |
| DIII              | 25         | 20,00         |
| S-1/DIV           | 77         | 61,60         |
| S-2               | 10         | 8,00          |
| <b>Jumlah</b>     | <b>125</b> | <b>100,00</b> |

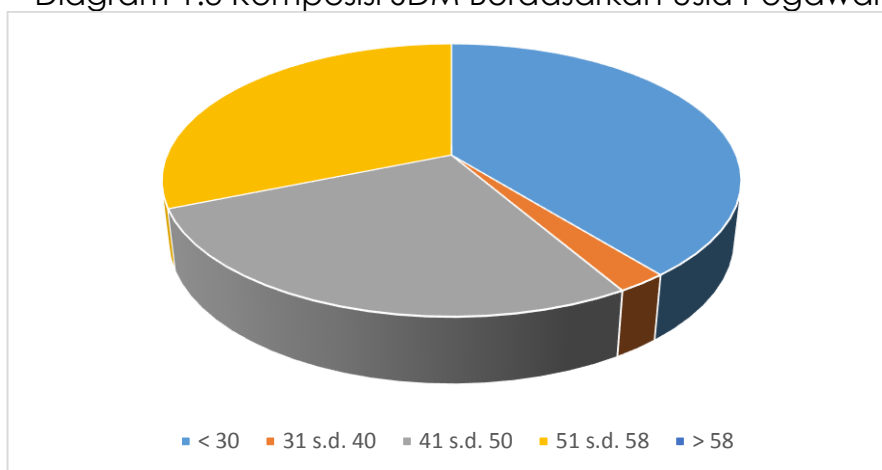
Diagram 1.2 Komposisi SDM Berdasarkan Strata Pendidikan



Tabel 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

| Usia Pegawai (Tahun) | Tahun 2016 |               |
|----------------------|------------|---------------|
|                      | Orang      | %             |
| ≤ 30                 | 49         | 39,20         |
| 31 s.d. 40           | 3          | 2,40          |
| 41 s.d. 50           | 34         | 27,20         |
| 51 s.d. 58           | 39         | 31,20         |
| > 58                 | 0          | 0,00          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>125</b> | <b>100,00</b> |

Diagram 1.3 Komposisi SDM Berdasarkan Usia Pegawai

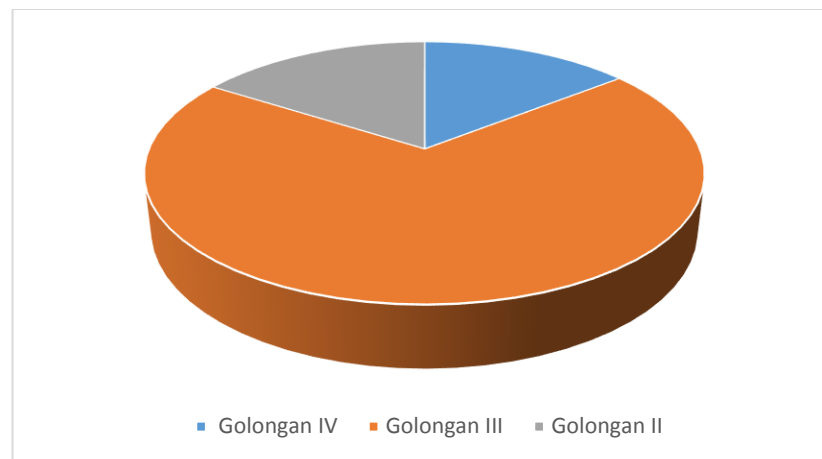


Tabel 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

| Golongan      | Tahun 2016 |               |
|---------------|------------|---------------|
|               | Orang      | %             |
| IV            | 18         | 14,40         |
| III           | 87         | 69,60         |
| II            | 20         | 16,00         |
| <b>Jumlah</b> | <b>125</b> | <b>100,00</b> |



Diagram 1.4 Komposisi SDM Berdasarkan Golongan



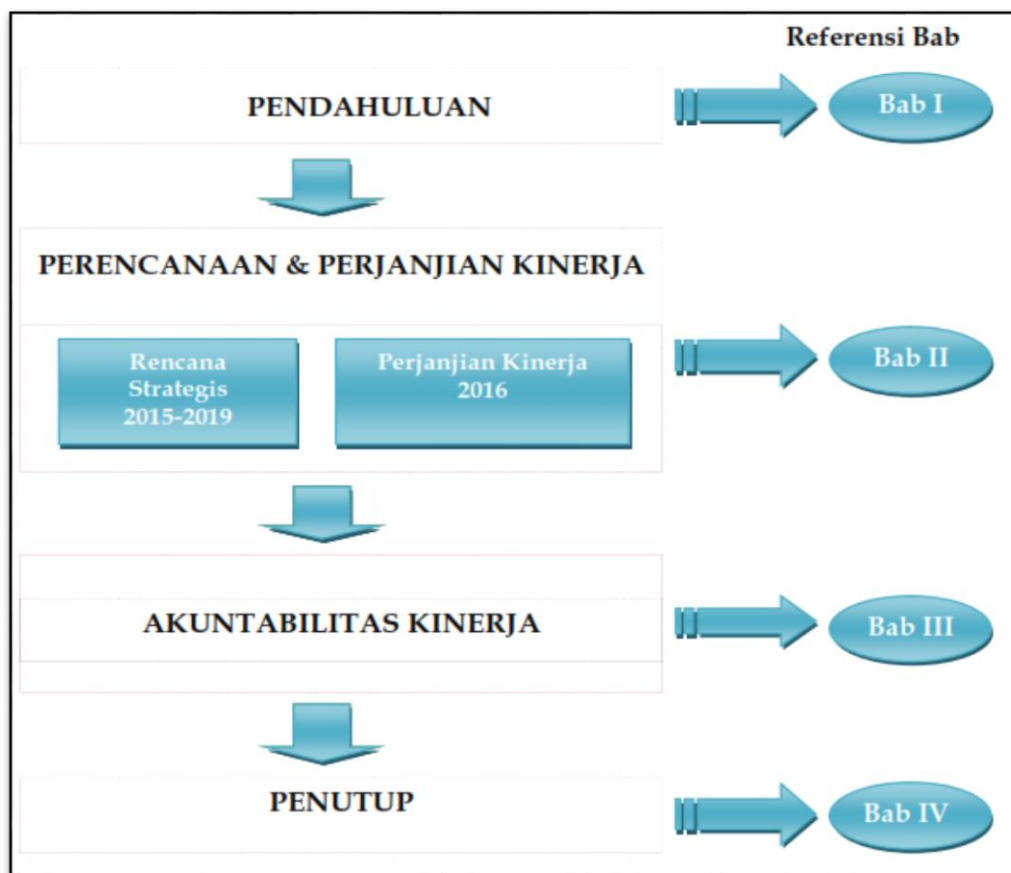
### E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016. Capaian kinerja tahun 2016 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap target kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis, kegiatan dan produk serta struktur organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan.
- Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kerja, menjelaskan secara ringkas rencana strategis 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dikaitkan dengan sasaran program serta realisasi keuangan.
- Bab IV - Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Gambar 1.3 Sistematika Penyajian



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

---

BPKP telah merancang strategi pengawasan ke dalam empat fokus atau dimensi sebagai respon terhadap kompleksitas isu pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pengawasan Pembangunan Nasional
2. Peningkatan Ruang Fiskal
3. Pengamanan Aset Negara/Daerah
4. Peningkatan *Governance System*

Dalam upaya mendukung BPKP, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 sebagai salah satu alat untuk mengelola sumber daya yang terbatas dalam rangka mengeksekusi strategi pengawasan tersebut. Renstra telah diselaraskan dengan visi, misi, dan tujuan BPKP sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BPKP periode 2015-2019 sebagai berikut:

### A. Rencana Strategis 2015-2019

#### 1. Pernyataan Visi

BPKP telah menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya. Visi BPKP diharapkan menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan

tugasnya sehingga terwujudnya visi BPKP merupakan suatu keniscayaan.

## 2. Pernyataan Misi

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

- a. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional guna mendukung tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan efektif;
- b. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif;
- c. Mengembangkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

## 3. Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan serta operasionalisasi visi dan misi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lebih dari satu sampai dengan lima tahun. Dalam penetapan tujuan, BPKP mengadopsi konsep *Balanced Scorecard* (BSC) dengan beberapa modifikasi disesuaikan dengan karakteristik BPKP sebagai organisasi publik. Berbeda dengan konsep BSC di sektor *private*/bisnis yang berorientasi kepada profit, BPKP memodifikasi perspektif keuangan menjadi perspektif manfaat bagi *stakeholders* dan perspektif pelanggan menjadi perspektif manfaat bagi auditan/pengguna jasa. Dengan menggunakan pendekatan BSC tersebut maka tujuan utama dari

perspektif manfaat bagi pihak *stakeholders* utama dan auditor/pengguna jasa diseimbangkan dengan tujuan pendukung yang berada pada perspektif proses internal dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yang berorientasi ke dalam. Tujuan utama BPKP tercermin dalam tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional yang bersih dan efektif;
- b. Peningkatan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern pemerintah yang profesional dan kompeten.

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, BPKP telah menyusun sasaran strategis sebagai bentuk penjabaran lebih lanjut dari tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, untuk dapat dilaporkan pencapaiannya dalam kurun waktu satu tahun. Sasaran strategis BPKP yang diharapkan dicapai setiap tahun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional;
- b. Meningkatnya maturitas sistem pengendalian intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Korporasi;
- c. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah serta Korporasi.

#### **4. Indikator Kinerja Utama**

Pencapaian sasaran strategis BPKP harus didukung dengan capaian sasaran program dan kegiatan oleh perwakilan yang diukur melalui indikator sasaran program dan kegiatan.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan beberapa indikator sasaran program sebagai indikator kinerja

utama (IKU). Yang merupakan indikator kinerja pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* yang menunjukkan peran dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak sepuluh indikator dapat dilihat dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama Sasaran Program

| NO  | INDIKATOR KINERJA UTAMA  |
|---|--|
| Perbaiki pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara |  |
| 1.1   | Perbaiki tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional                      |
| 1.2   | Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi |
| 1.3   | Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum  |
| Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi                            |  |
| 2.1   | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)   |
| 2.2   | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina                                   |
| 2.3   | Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina   |
| Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda                                |  |
| 3.1   | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)   |
| 3.2   | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)   |
| 3.3   | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)   |
| 3.4   | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)   |

Di samping IKU tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki sasaran program meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan yang dinilai dengan indikator kinerja persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10).

5. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun program dan kegiatan yang sejalan dengan program dan kegiatan BPKP.

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan memiliki dua program utama sebagai berikut:

- Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan anggaran sebesar Rp3.456.518.000,00;
- Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dengan anggaran sebesar Rp21.670.545.000,00.

Lebih rinci Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki kegiatan-kegiatan yang mendukung program sebagaimana terdapat dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2  
Program dan Kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan

| No | Program, Sasaran Program, dan Kegiatan  |
|----|---|
|    | Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah |
|    | Sasaran Program 1. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional                        |
| 1  | Audit Keuangan Program Berbantuan Luar Negeri   |
| 2  | Audit Kinerja Program Ketahanan Pangan  |
| 3  | Audit Kinerja atas Jaminan Kesehatan Nasional   |
| 4  | Monev atas Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan                           |
| 5  | Audit Pengelolaan PNPB  |
| 6  | Pendampingan/Bimbingan Teknis/Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan   |
| 7  | Evaluasi Penyelenggaraan Fungsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal   |
| 8  | Evaluasi Program Ketahanan Energi   |
| 9  | Monitoring Prioritas Pembangunan Nasional (KSP)   |
| 10 | Reviu atas Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa  |
| 11 | Pengawasan Atas Pengelolaan Dana Transfer (DAK/DAU/DBH)   |
| 12 | Evaluasi Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah atas Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular                    |
| 13 | Bimbingan Teknis dan Asistensi Pengembangan GCG   |
| 14 | Bimbingan Teknis, Asistensi, dan Pendampingan Implementasi BLUD   |
| 15 | Evaluasi Kinerja BUMD   |

| No   | Program, Sasaran Program, dan Kegiatan   |
|--|--|
| 16   | Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Implementasi <i>Fraud Control Plan (FCP)</i> |
| 17   | Sosialisasi Program Anti Korupsi (SosPAK)  |
| 18   | Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara  |
| 19   | Audit Investigatif   |
| 20   | Audit Penyesuaian Harga dan Klaim  |
| 21   | Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan   |
| Sasaran Program 2. Meningkatnya Maturitas SPIP                                     |  |
| 1  | Workshop Implementasi SPIP   |
| 2  | Bimtek Penilaian Maturity Level SPIP   |
| 3  | Pendampingan Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian dengan metode CSA                    |
| 4  | Penilaian Maturitas SPIP   |
| Sasaran Program 3. Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah K/L/Pemda |  |
| 1  | QA Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)                    |
| 2  | Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP                 |

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan berisi indikator kinerja yang berada pada perspektif manfaat bagi *stakeholders* dan berfungsinya *output* yang menunjukkan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengawasan akuntabilitas keuangan negara/daerah, pembinaan penyelenggaraan SPIP, dan pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari sasaran program dan kegiatan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan. Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan visi, misi, dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tujuan strategis BPKP.

Target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dapat dilihat dalam tabel 2.3.



Tabel 2.3  
Perjanjian Kinerja Tahun 2016

| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN |  | INDIKATOR KINERJA  |             | TARGET |        |
|--------------------------|--|--|-------------|--------|--------|
|                          |  |  |             | Satuan | Jumlah |
| <b>A.</b>                | <b>Sasaran Program</b>   | <b>Indikator Kinerja Program</b>   |             |        |        |
| 1.                       | Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi |  |             |        |        |
|                          | 1.1  | Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional                     | %           | 45     |        |
|                          | 1.2  | Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi | %           | 100    |        |
|                          | 1.3  | Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum  | %           | 60     |        |
| 2.                       | Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi                                       |  |             |        |        |
|                          | 2.1  | Maturitas SPIP Pemerintah Propinsi (level 3)   | %           | -      |        |
|                          | 2.2  | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)   | %           | 15     |        |
|                          | 2.3  | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina                                   | %           | 52     |        |
|                          | 2.4  | Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina   | %           | 58     |        |
| 3.                       | Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda   |  |             |        |        |
|                          | 3.1  | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 3)   | %           | -      |        |
|                          | 3.2  | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)   | %           | 15     |        |
|                          | 3.3  | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)   | %           | 100    |        |
|                          | 3.4  | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)   | %           | 30     |        |
|                          | 3.5  | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 1)   | %           | -      |        |
|                          | 3.6  | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)   | %           | 55     |        |
|                          | <b>Sasaran Kegiatan</b>  | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>  |             |        |        |
| 1.                       | Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP                                |  |             |        |        |
|                          | 1.1  | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP   | Rekomendasi | 108    |        |
|                          | 1.2  | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita  | Rekomendasi | 27     |        |
|                          | 1.3  | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita   | Rekomendasi | 4      |        |
|                          | 1.4  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP   | Rekomendasi | 35     |        |
|                          | 1.5  | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda  | Rekomendasi | 2      |        |

| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA   |  | TARGET         |        |
|--------------------------|---|--|----------------|--------|
|                          |   |  | Satuan         | Jumlah |
| B. Sasaran Program       | Indikator Kinerja Program   |  |                |        |
| 1.                       | Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP                               |  |                |        |
|                          | 1.1   | Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)          | skala          | 7      |
| Sasaran Kegiatan         | Indikator Kinerja Kegiatan  |  |                |        |
| 1.                       | Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan |  |                |        |
|                          | 1.1   | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP                | laporan        | 80     |
| 2.                       | Termanfaatkannya Aset secara optimal  |  |                |        |
|                          | 2.1   | Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasaran Peralatan dan Mesin | Unit           | 11     |
|                          | 2.2   | Rehabilitasi Gedung dan Bangunan                                 | m <sup>2</sup> | 820    |

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

---

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan yang diambil dalam pencapaian sasaran, serta penggunaan sumber daya, Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah melaksanakan pengukuran kinerja dan menyajikan akuntabilitas kinerja tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dan target yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2016. Pengukuran dihitung menggunakan rumus yang telah ditetapkan sesuai dengan karakter masing-masing indikator dengan batasan maksimal capaian kinerja IKU sebesar 200%.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. *Maximize*

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

b. *Minimize*

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus *minimize* digunakan untuk mengukur IKU Kapabilitas APiP Level 1.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap sasaran program dan indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja juga dilakukan perbandingan-perbandingan antara realisasi kinerja dengan target tahun berjalan, realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi tahun lalu dan perbandingan lain yang diperlukan.

Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan proporsi capaian kinerja dengan proporsi penggunaan sumber daya baik dana dan sumber daya manusia, yang dalam hal ini direpresentasikan dengan Orang/Hari (OH). Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya, baik dana maupun OH. Analisis efisiensi dilakukan terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum capaian kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Ikhtisar Capaian Kinerja Tahun 2016

| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN  | INDIKATOR KINERJA  | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|---------------------------|--|--------|--------|-----------|-----------|
| <b>A. Sasaran Program</b> | <b>Indikator Kinerja Program</b>   |        |        |           |           |
| 1.                        | Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi                       |        |        |           |           |
| 1.1                       | Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional                     | %      | 45     | 57,14     | 126,98    |
| 1.2                       | Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi | %      | 100    | 100,00    | 100,00    |
| 1.3                       | Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum  | %      | 60     | 100,00    | 166,67    |
| 2.                        | Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi   |        |        |           |           |
| 2.1                       | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)   | %      | 15     | 15,39     | 102,60    |
| 2.2                       | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina                                   | %      | 52     | 76,92     | 147,92    |

| SASARAN PROGRAM/KEGIATAN   |                           | INDIKATOR KINERJA  | Satuan         | Target | Realisasi | % Capaian |
|--|---------------------------|--|----------------|--------|-----------|-----------|
|  | 2.3                       | Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina | %              | 58     | 100,00    | 172,41    |
| 3. Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda  |                           |  |                |        |           |           |
|  | 3.1                       | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)               | %              | 15     | 15,38     | 102,53    |
|  | 3.2                       | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)                     | %              | 100    | 100,00    | 100,00    |
|  | 3.3                       | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)               | %              | 30     | 76,92     | 100,00    |
|  | 3.4                       | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)               | %              | 55     | 7,69      | 186,01    |
|  | <b>Sasaran Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                  |                |        |           |           |
| 1. Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP   |                           |  |                |        |           |           |
|  | 1.1                       | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP                             | Rekomendasi    | 108    | 108       | 100,00    |
|  | 1.2                       | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita                    | Rekomendasi    | 27     | 27        | 100,00    |
|  | 1.3                       | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita     | Rekomendasi    | 4      | 4         | 100,00    |
|  | 1.4                       | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP                         | Rekomendasi    | 35     | 35        | 100,00    |
|  | 1.5                       | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda          | Rekomendasi    | 2      | 2         | 100,00    |
|  |                           |  |                |        |           |           |
|  | <b>B. Sasaran Program</b> | <b>Indikator Kinerja Program</b>                                   |                |        |           |           |
| 1. Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP                               |                           |  |                |        |           |           |
|  | 1.1                       | Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)            | skala          | 7      | 7,93      | 113,21    |
|  | <b>Sasaran Kegiatan</b>   | <b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>                                  |                |        |           |           |
| 1. Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan |                           |  |                |        |           |           |
|  | 1.1                       | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP                  | laporan        | 80     | 80        | 100,00    |
| 2. Termanfaatkannya Aset secara optimal  |                           |  |                |        |           |           |
|  | 2.1                       | Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin  | Unit           | 11     | 11        | 100,00    |
|  | 2.2                       | Rehabilitasi Gedung dan Bangunan                                   | m <sup>2</sup> | 820    | 820       | 100,00    |
|  |                           |  |                |        |           |           |

Secara rinci analisis capaian kinerja tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

### **Sasaran Program 1**

#### **Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara**

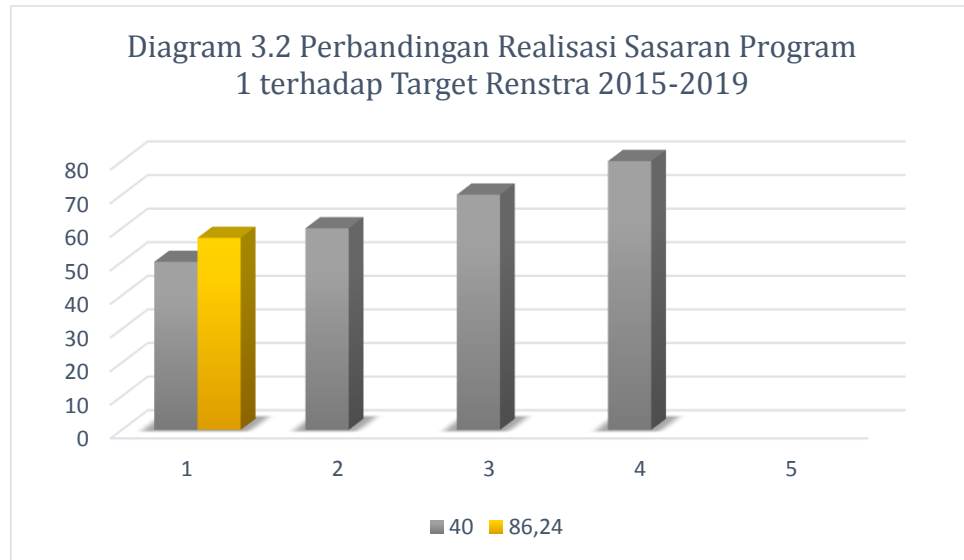
Pencapaian sasaran program “Perbaikan Pengelolaan Program Prioritas Nasional dan Pengelolaan Keuangan Negara” diukur menggunakan tiga IKU yaitu “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional”, “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi”, dan “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum”.

Pada tahun 2016 IKU “Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional” ditargetkan sebesar 45%, “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” ditargetkan sebesar 100%, dan “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” ditargetkan sebesar 60%.

Selama tahun 2016 tercapai kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Sedangkan perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Pencapaian sasaran program 1 juga didukung sumber daya yang memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM). Realisasi sasaran program 1 telah didukung dana sebesar Rp2.402.971.553,00 atau 92,20% dari anggaran sebesar Rp2.606.386.000,00 dan SDM sebanyak 14.923OH atau 118,41% dari rencana sebanyak 12.602 OH.

Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 131,33% lebih tinggi dari capaian penggunaan dana 92,20% dan penggunaan SDM 118,41%.

Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:

### **IKU 1 Sasaran Program 1**

Perbaikan Tata kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional

Pada tahun 2016 IKU "Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional" ditargetkan sebesar 45%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak

lanjut terhadap rekomendasi yang telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagai bentuk perbaikan dalam bidang tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional.

Realisasi IKU "Perbaikan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional" pada tahun 2016 mencapai 57,14% atau sebesar 126,98% dari target yang telah ditetapkan sebesar 45%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 188,56% maka dalam tahun 2016 terjadi penurunan kinerja sebesar 61,58%.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Memberikan koreksi sesuai hasil verifikasi tunggakan TPG di lingkungan Kantor Kementerian Agama se Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Saran perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan pada satuan kerja pemerintah pusat;
3. Rekomendasi dan saran sesuai hasil audit laporan keuangan program dan kegiatan yang bersumber dari PHLN;
4. Memberikan saran dan perbaikan terhadap kinerja pengelolaan program JKN;
5. Melakukan pendataan/perhitungan jumlah kebutuhan pupuk untuk pertanian pada 13 kabupaten/kota;
6. Perbaikan pelaksanaan reviu RKPD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016;
7. Koordinasi dengan LPSE dalam rangka percepatan proses pengadaan di lingkungan pemerintah daerah;
8. *Update database* potensi pajak daerah maupun retribusi daerah;



9. Update aplikasi SIMDA Keuangan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016;
10. Pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes sesuai peraturan yang berlaku;
11. Koordinasi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut atas temuan BPK-RI.

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan capaian kinerja sasaran kegiatan "Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP" yang diukur menggunakan tiga indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 77 rekomendasi atau 100% dari target 77 rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan dari penugasan pengawasan (PP) yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya target kinerja kegiatan serta didasarkan pada fokus pengawasan BPKP. Rekomendasi yang dihasilkan tersebut berupa :

| No | Jenis Rekomendasi  | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP                    | 50     |
| 2  | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita)             | 23     |
| 3  | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita | 4      |
|    | Rekomendasi dihasilkan   | 77     |

Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 5.A.

### ***IKU 2 Sasaran Program 1***

**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi**

Pada tahun 2016 IKU "Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi" ditargetkan sebesar 100%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase tindak lanjut terhadap rekomendasi yang

telah disampaikan dalam Laporan Hasil Pengawasan sebagai bentuk perbaikan dalam bidang tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan korporasi.

Realisasi IKU “Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi” pada tahun 2016 mencapai 100% atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 94,12% maka terjadi peningkatan kinerja dalam tahun 2016 sebesar 5,88%.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Koordinasi dengan kantor pusat Perum Bulog untuk pengklarifikasian kejelasan kepemilikan tanah;
2. Penghitungan estimasi biaya penyelesaian pembangunan pembangkit PLTU Kotabaru;
3. Meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target MDG's tahun 2015 sebesar 68,87%;
4. Memperbaiki area-area GCG yang masih memerlukan perbaikan (*weakness area*) bersama partisipan GCG;
5. Tersusunnya PKAT berpedoman pada SPFAIB.

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan capaian kinerja sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP” yang diukur menggunakan dua indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 19 rekomendasi atau 100% dari target 19 rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan dari penugasan pengawasan (PP) yang telah ditetapkan untuk mendukung

tercapainya target kinerja kegiatan serta didasarkan pada fokus pengawasan BPKP. Rekomendasi yang dihasilkan tersebut berupa :

| No | Jenis Rekomendasi                                  | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | 16     |
| 2  | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | 3      |
|    | Rekomendasi dihasilkan                             | 19     |

Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 5.B.

### **IKU 3 Sasaran Program 1**

#### **Penyerahan Hasil Pengawasan Keinvestigasian kepada Aparat Penegak Hukum**

Pada tahun 2016 IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” ditargetkan sebesar 60%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah laporan yang diserahkan ke APH/pemerintah daerah/korporasi dibandingkan dengan jumlah penugasan pengawasan.

Realisasi IKU “Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum” pada tahun 2016 mencapai 100% atau sebesar 166,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 100% maka kinerja tahun 2016 mengalami kenaikan 66,67%.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Memberikan bantuan keterangan ahli, audit investigatif, dan PKN;
2. Kajian hasil pengawasan dana bantuan sosial;
3. Sosialisasi Program Anti Korupsi;
4. Bimtek *Fraud Control Plan* (FCP).

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan capaian kinerja sasaran kegiatan "Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP" yang diukur menggunakan dua indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 43 rekomendasi atau 100% dari target 43 rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan dari penugasan pengawasan (PP) yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya target kinerja kegiatan serta didasarkan pada fokus pengawasan BPKP. Rekomendasi yang dihasilkan tersebut berupa :

| No | Jenis Rekomendasi                                  | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | 42     |
| 2  | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | 1      |
|    | Rekomendasi dihasilkan                             | 43     |

Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 5.C.

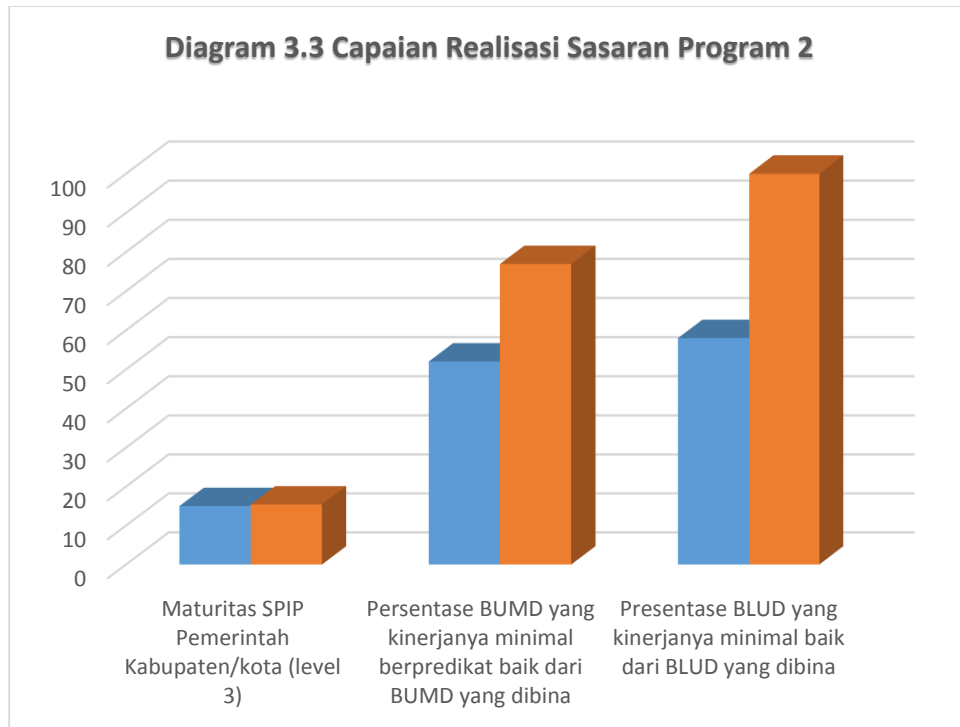
## **Sasaran Program 2**

### **Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi**

Pencapaian sasaran program "Meningkatnya Kualitas Penerapan SPIP Pemerintah Daerah/Korporasi" diukur menggunakan tiga IKU yaitu "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)", "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina", dan "Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina".

Pada tahun 2016 IKU "Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)" ditargetkan sebesar 15%, "Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina" ditargetkan sebesar 52%, dan "Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina" ditargetkan sebesar 58%.

Selama tahun 2016 tercapai kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Pencapaian sasaran program 2 juga didukung sumber daya yang memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM). Realisasi sasaran program 2 telah didukung dana sebesar Rp742.357.846,00 atau 96,74% dari anggaran sebesar Rp767.379.000,00 dan SDM sebanyak 3.332 OH atau 95,12% dari rencana sebanyak 3.503 OH.

Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 112,25% lebih tinggi dari capaian penggunaan dana 96,74% dan penggunaan SDM 95,12%.

Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:

### **IKU 1 Sasaran Program 2**

#### **Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)**

Pada tahun 2016 IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” ditargetkan sebesar 15%. Kinerja diukur dengan menghitung

persentase jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai Maturitas SPIP level 3 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai level 3 yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Sehingga realisasi IKU “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” pada tahun 2016 mencapai 15,39% atau sebesar 102,60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai. Rincian penilaian maturitas SPIP disajikan dalam Lampiran 6.

Kinerja indikator “Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)” tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena belum ditargetkan. Namun jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan kinerja sebesar 15,39%, karena dalam tahun 2015 tidak terdapat pemerintah daerah yang mencapai maturitas SPIP level 3, sedangkan dalam tahun 2016 terdapat dua pemerintah daerah mencapai maturitas SPIP level 3.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Tersusunnya kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan secara formal pada Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Terlaksakannya rencana pengendalian yang akan diterapkan atas risiko yang ada;
3. Perbaikan Rencana Strategis (Renstra) pada RSUD Ratu Zalecha;
4. Verifikasi atas *mapping* rekening akrual pada menu parameter aplikasi SIMDA Keuangan dan verifikasi data yang diinput pada

Aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu saldo awal, jurnal balik, dan jurnal penyesuaian.

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan capaian kinerja sasaran kegiatan "Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP" yang diukur menggunakan satu indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 20 rekomendasi atau 100% dari target 20 rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan dari penugasan pengawasan (PP) yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya target kinerja kegiatan serta didasarkan pada fokus pengawasan BPKP. Rekomendasi yang dihasilkan tersebut berupa :

| No | Jenis Rekomendasi  | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk <i>Piloting</i> ) | 20     |

Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 5.D.

### ***IKU 2 Sasaran Program 2***

#### **Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina**

Pada tahun 2016 IKU "Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina" ditargetkan sebesar 52%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah BUMD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BUMD yang dievaluasi kinerja pada tahun berjalan.

Dari 13 BUMD yang dievaluasi kinerja sebanyak 10 perusahaan atau 76,92% yang mendapatkan skor baik. Sehingga realisasi IKU "Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina" pada tahun 2016 mencapai 76,92% atau sebesar 147,92% dari target yang telah ditetapkan sebesar 52%. Hal ini

menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai. Rincian penilaian kinerja disajikan dalam Lampiran 7.

Kinerja indikator “Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina” tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena belum ditargetkan.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Ditetapkannya Keputusan Direktur atas *draft* pedoman penatausahaan aset tetap pada PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Implementasi GCG pada PD Pasar Bauntung Batuah, PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan;
3. Penilaian kesesuaian pemasangan sambungan rumah dengan *data baseline survey* dan menilai kelayakan sambungan rumah yang dibangun.

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan capaian kinerja sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP” yang diukur menggunakan satu indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 7 rekomendasi atau 100% dari target 7 rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan dari penugasan pengawasan (PP) yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya target kinerja kegiatan serta didasarkan pada fokus pengawasan

| No | Jenis Rekomendasi  | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk <i>Piloting</i> ) | 7      |

Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 5.E.



### **IKU 3 Sasaran Program 2**

#### **Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina**

Pada tahun 2016 IKU “Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina” ditargetkan sebesar 58%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah BLUD yang kinerjanya mendapatkan skor minimal baik dibandingkan dengan jumlah BLUD yang dievaluasi kinerja pada tahun berjalan.

Dari dua BLUD yang dievaluasi kinerja seluruhnya mendapatkan skor baik (100%). Sehingga realisasi IKU “Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina” pada tahun 2016 mencapai 100% atau sebesar 172,41% dari target yang telah ditetapkan sebesar 58%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.

Kinerja indikator “Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BLUD yang Dibina” tahun 2016 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena belum ditargetkan.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

1. Implementasi SIA dan *Billing System* pada PDAM Tanah Laut;
2. Optimalisasi SPI RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan;
3. Implementasi dokumen RSB sebagai dasar anggaran dan kinerja Puskesmas Banjarbaru Utara;
4. Implementasi Dokumen Pola Tata Kelola dan Standar Pelayanan Minimal sebagai dasar operasional Puskesmas Banjarbaru Utara.

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan capaian kinerja sasaran kegiatan “Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP” yang diukur menggunakan satu indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang

telah dihasilkan adalah sebanyak 8 rekomendasi atau 100% dari target 8 rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan dari penugasan pengawasan (PP) yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya target kinerja kegiatan. Rekomendasi yang dihasilkan tersebut berupa :

| No | Jenis Rekomendasi  | Jumlah |
|----|--|--------|
| 1  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | 8      |

Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 5.F.

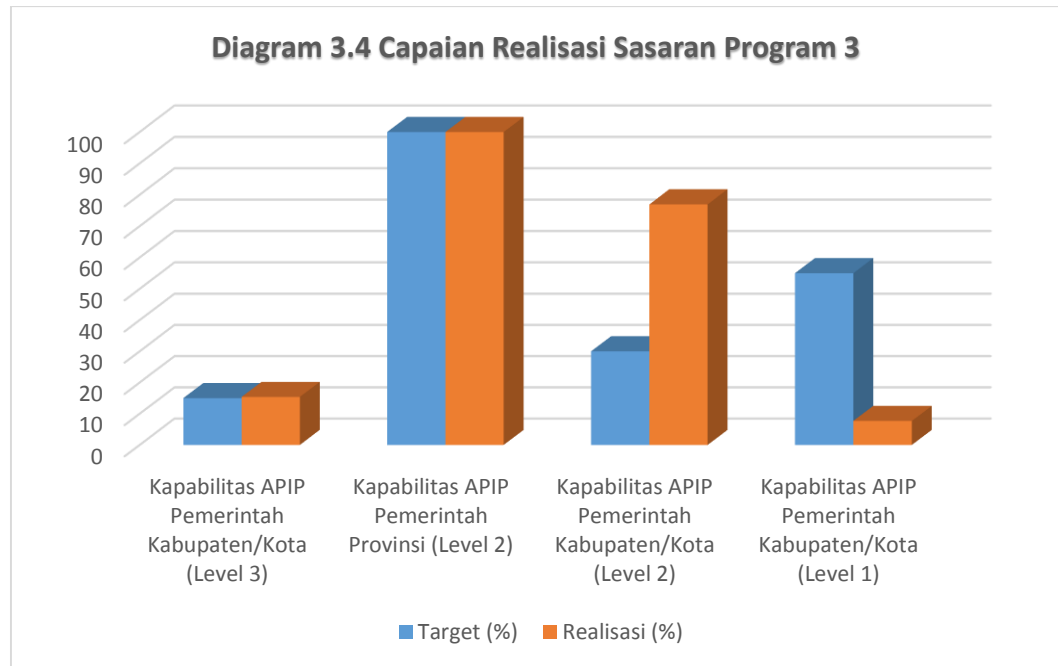
### **Sasaran Program 3**

#### **Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah**

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah” diukur menggunakan empat IKU yaitu “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)”, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)”.

Pada tahun 2016 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” ditargetkan sebesar 15%, “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” ditargetkan sebesar 100%, “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” ditargetkan sebesar 30%, dan “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” ditargetkan sebesar 55%.

Selama tahun 2016 tercapai kinerja atas IKU yang ditargetkan dapat dilihat dalam gambar di bawah.



Rincian kapabilitas APIP disajikan dalam Lampiran 9.

Pencapaian sasaran program 3 juga didukung sumber daya yang memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM). Realisasi sasaran program 3 telah didukung dana sebesar Rp80.908.055,00 atau 97,77% dari anggaran sebesar Rp82.753.000,00 dan SDM sebanyak 551 OH atau 115,60% dari rencana sebanyak 477 OH.

Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 147,25% lebih tinggi dari capaian penggunaan dana 97,77% dan penggunaan SDM 115,60%.

Pencapaian kinerja sasaran program tersebut didukung dengan capaian kinerja sasaran kegiatan "Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP" yang diukur menggunakan satu indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebanyak 2 rekomendasi atau 100% dari target 2 rekomendasi. Rekomendasi dihasilkan dari penugasan pengawasan (PP) yang telah ditetapkan untuk mendukung

tercapainya target kinerja kegiatan serta didasarkan pada fokus pengawasan BPKP. Rekomendasi yang dihasilkan tersebut berupa :

| No | Jenis Rekomendasi   | Jumlah |
|----|---|--------|
| 1  | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda | 2      |

Rincian rekomendasi beserta tindak lanjutnya disajikan dalam Lampiran 5.G.

Rincian analisis kinerja masing-masing IKU disajikan sebagai berikut:

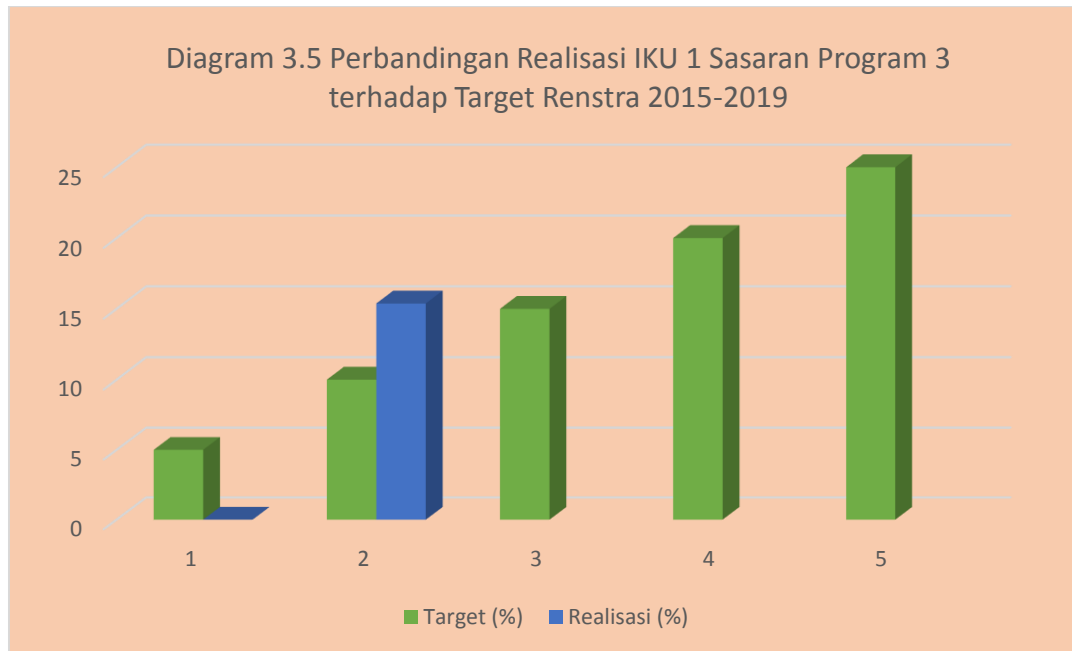
### ***IKU 1 Sasaran Program 3***

#### **Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)**

Pada tahun 2016 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” ditargetkan sebesar 15%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai Kapabilitas APIP level 3 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dari 13 pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 2 pemerintah kabupaten/kota telah mencapai level 3 yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Sehingga realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)” pada tahun 2016 mencapai 15,38% atau sebesar 102,53% dari target yang telah ditetapkan sebesar 15%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 sebesar 0% maka terjadi peningkatan kinerja sebesar 15,38%. Sedangkan perbandingan realisasi IKU dengan target akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah peningkatan kapabilitas APIP dari level 2 ke level 3 sebanyak 2 APIP pada pemerintah daerah yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar.

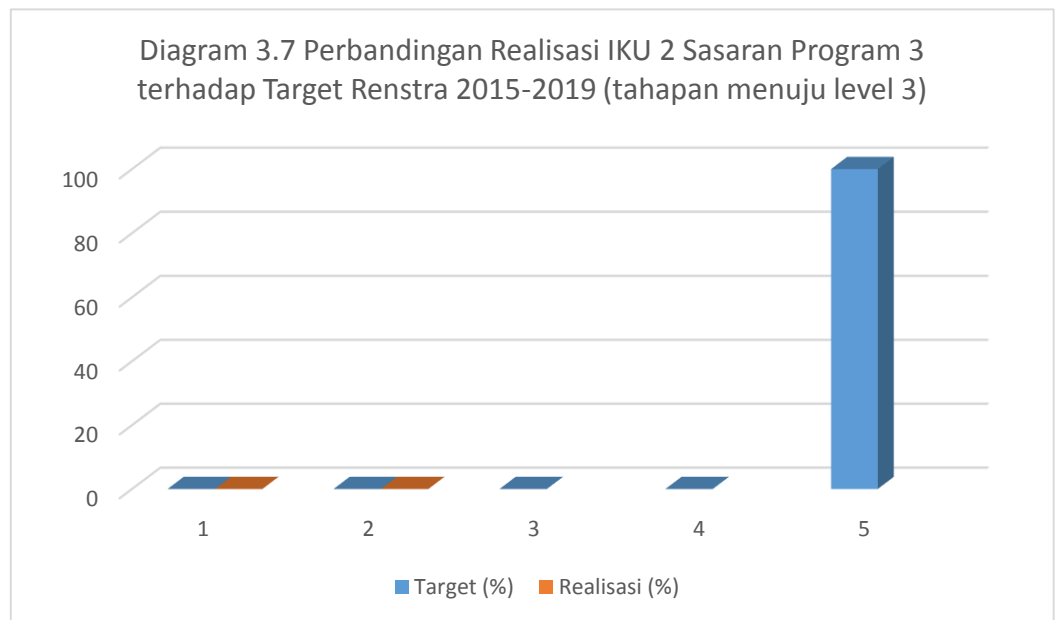
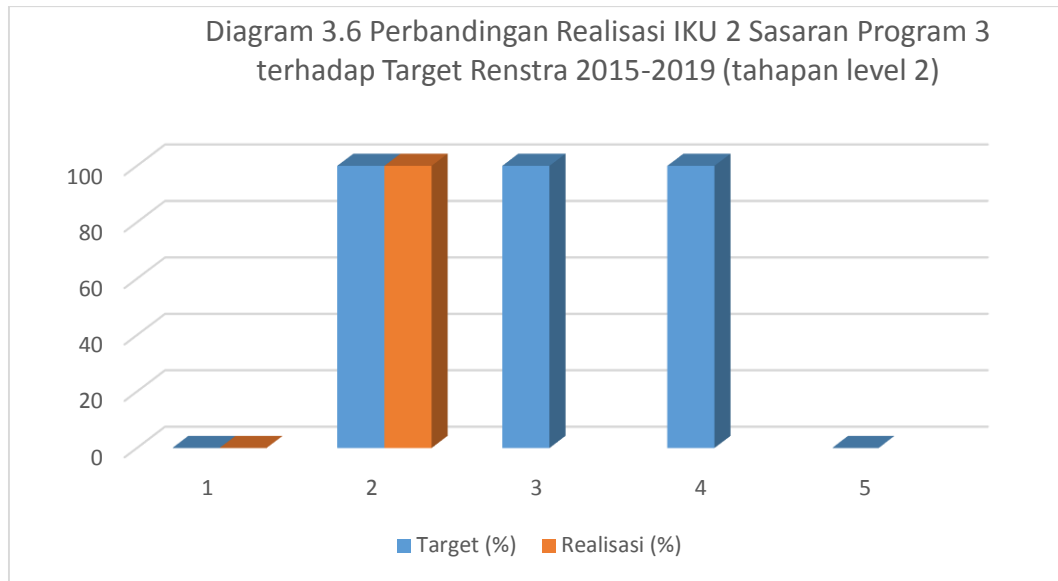
### **IKU 2 Sasaran Program 3**

#### **Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)**

Pada tahun 2016 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” ditargetkan sebesar 100%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah pemerintah provinsi yang telah mencapai Kapabilitas APIP level 2 dibandingkan jumlah pemerintah provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)” pada tahun 2016 mencapai 100% atau sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.

Perbandingan realisasi IKU menuju target level 3 pada akhir Renstra Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan periode 2015-2019 disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah APIP Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan penilaian mandiri dengan aplikasi.

### **IKU 3 Sasaran Program 3**

#### **Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)**

Pada tahun 2016 IKU "Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)" ditargetkan sebesar 30%. Kinerja diukur dengan menghitung persentase jumlah pemerintah kabupaten/kota yang telah mencapai

Kapabilitas APIP level 2 dibandingkan jumlah seluruh pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai capaian maksimal 100%.

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)” pada tahun 2016 mencapai 76,92% atau sebesar 100% (nilai maksimal) dari target yang telah ditetapkan sebesar 30%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.



Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah peningkatan kapabilitas APIP dari level 1 ke level 2 sebanyak 9 APIP pemerintah kabupaten/kota atas penilaian mandiri. Dua APIP di antaranya telah dilakukan validasi kapabilitas yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tanah Laut.

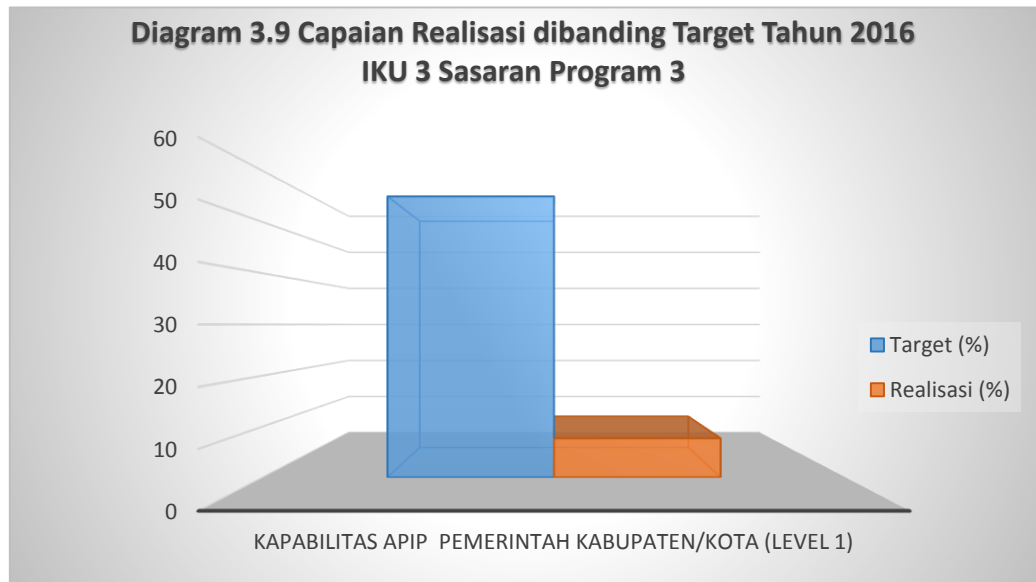
### **IKU 4 Sasaran Program 3**

#### **Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)**

Pada tahun 2016 IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” ditargetkan sebesar 55%. Capaian kinerja diukur dengan menggunakan rumus *minimize* sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \quad \text{atau} \quad \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Realisasi IKU “Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)” pada tahun 2016 mencapai 8% atau sebesar 186% dari target yang telah ditetapkan sebesar 55%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tahun 2016 telah tercapai.



Realisasi lebih rendah dari target menunjukkan capaian kinerja yang lebih baik karena hal tersebut berarti pemerintah daerah telah mencapai kapabilitas APIP di atas level 1.

Perbaikan yang dihasilkan dari pelaksanaan peran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan adalah berkurangnya jumlah APIP pemerintah daerah yang kapabilitasnya masih berada di level 1 sebanyak 9 APIP pemerintah kabupaten/kota.

#### **Sasaran Program 4**

##### **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP**

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis dalam Pengawasan BPKP” diukur menggunakan satu indikator kinerja yaitu “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Bagian Tata Usaha)”. Pada tahun 2016 indikator ini ditargetkan mencapai skala 7 dari rentang nilai skala likert 1-10.



Realisasi indikator “Persepsi Kepuasan Layanan Kesesmaan (Bagian Tata Usaha)” pada tahun 2016 mencapai nilai skala 7,93 atau 113,2% dari target skala 7. Rincian penilaian indikator program disajikan terlampir.

Pencapaian sasaran program 4 juga didukung sumber daya yang memadai baik dari segi dana maupun sumber daya manusia (SDM). Realisasi sasaran program 4 telah didukung dana sebesar Rp20.971.465.145,00 atau 96,77% dari anggaran sebesar Rp21.670.545.000,00 dan SDM sebanyak 9.042OH atau 100% dari rencana sebanyak 9.042OH.

Dari segi penggunaan dana dan SDM, sasaran program telah direalisasikan secara efektif. Hal ini terlihat dari rata-rata capaian IKU sasaran program sebesar 113,21% lebih tinggi dari capaian penggunaan dana 96,77% dan penggunaan SDM 100%

Pencapaian kinerja sasaran program di atas juga didukung dengan dua sasaran kegiatan yang diukur tiga indikator kinerja kegiatan tahun 2016. Indikator kinerja kegiatan yang telah dihasilkan adalah sebagai berikut:

| No | Indikator Kinerja Kegiatan  | Satuan         | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|---|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1  | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP                 | laporan        | 80     | 80        | 100       |
| 2  | Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin | Unit           | 11     | 11        | 100       |
| 3  | Rehabilitasi Gedung dan Bangunan                                  | m <sup>2</sup> | 820    | 820       | 100       |

## B. Realisasi Keuangan

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 sebesar Rp25.127.063.000,00 dengan realisasi Rp24.197.702.599,00. Rincian per program dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Jenis Belanja   | Anggaran              | Realisasi             | % Capaian    |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BPKP  | 21.670.545.000        | 20.971.465.145        | 96,77        |
| Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 3.456.518.000         | 3.226.237.454         | 93,34        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>25.127.063.000</b> | <b>24.197.702.599</b> | <b>96,30</b> |

Kegiatan pengawasan selain direalisasikan menggunakan anggaran perwakilan tersebut, juga menggunakan anggaran yang berasal dari dana mitra sebesar Rp1.320.095.311,00 dengan rincian sebagai berikut:

| Bidang        | Dana Mitra           |
|---------------|----------------------|
| IPP           | 557.847.561          |
| APD           | 728.270.250          |
| AN            | -                    |
| Investigasi   | -                    |
| P3A           | -                    |
| <b>Jumlah</b> | <b>1.286.117.811</b> |

Rincian per mata anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

| Jenis Belanja   | Anggaran              | Realisasi             | % Capaian     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Belanja Pegawai | 17.937.997.000        | 17.307.032.642        | 96,48%        |
| Belanja Modal   | 588.860.000           | 588.483.700           | 99,94%        |
| Belanja Barang  | 6.600.206.000         | 6.302.186.257         | 95,48%        |
| <b>Jumlah</b>   | <b>25.127.063.000</b> | <b>24.197.702.599</b> | <b>96,30%</b> |

Rendahnya penyerapan anggaran tahun 2016 disebabkan antara lain terdapat anggaran pengawasan yang tidak dapat direalisasikan (bertanda bintang) sebesar Rp151.265.000,00.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, di samping merupakan pertanggungjawaban kinerja perwakilan dalam mencapai sasaran program tahun 2016, juga mencerminkan sejauh mana Sistem AKIP telah diimplementasikan. Beberapa perbaikan mendasar telah dilakukan terhadap seluruh komponen Sistem AKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 tercermin dari pencapaian sasaran program sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Program Tahun 2016

| Sasaran Program          | Indikator Kinerja Program |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Sasaran Program 1</b> | IKU 1 tercapai 126,98%    |
|                          | IKU 2 tercapai 100%       |
|                          | IKU 3 tercapai 166,67%    |
| <b>Sasaran Program 2</b> | IKU 1 tercapai 102,60%    |
|                          | IKU 2 tercapai 147,92%    |
|                          | IKU 3 tercapai 172,41%    |
| <b>Sasaran Program 3</b> | IKU 1 tercapai 102,53%    |
|                          | IKU 2 tercapai 100%       |
|                          | IKU 3 tercapai 200%       |
|                          | IKU 4 tercapai 186,01%    |
| <b>Sasaran Program 4</b> | IKU 1 tercapai 113,21%    |

Secara umum Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai kinerja sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2016. Hal ini merupakan tantangan ke depan dalam mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja perwakilan. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Memperbaiki sistem perencanaan pengawasan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan efisien.
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi pengawasan dengan APIP mitra kerja untuk mendorong peningkatan kapabilitas APIP.
3. Meningkatkan/mengembangkan kompetensi SDM BPKP.
4. Memantau dan mendorong instansi yang dievaluasi untuk menetapkan kebijakan sesuai dengan rekomendasi yang disarankan.
5. Meningkatkan pembinaan penyelenggaraan SPIP bagi satuan kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan korporasi.
6. Meningkatkan koordinasi yang lebih efektif dengan mitra.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## LAMPIRAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM TAHUN 2016

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA  | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|-----------------|--|--------|--------|-----------|-----------|
| 1.              | Perbaiki pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi                        |        |        |           |           |
| 1.1             | Perbaiki tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional                      | %      | 45     | 57,14     | 126,98    |
| 1.2             | Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi | %      | 100    | 100,00    | 100,00    |
| 1.3             | Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasi kepada aparat penegak hukum  | %      | 60     | 100,00    | 166,67    |
| 2.              | Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi   |        |        |           |           |
| 2.1             | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)   | %      | 15     | 15,39     | 102,6     |
| 2.2             | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina                                   | %      | 52     | 76,92     | 147,92    |
| 2.3             | Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina   | %      | 58     | 100,00    | 172,41    |
| 3.              | Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda   |        |        |           |           |
| 3.1             | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)   | %      | 15     | 15,38     | 102,53    |
| 3.2             | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)   | %      | 100    | 100,00    | 100,00    |
| 3.3             | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)   | %      | 30     | 76,92     | 100,00    |
| 3.4             | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)   | %      | 55     | 7,69      | 186,01    |
| 4.              | Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP  |        |        |           |           |
| 4.1             | Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)  | skala  | 7      | 7,93      | 113,21    |
|                 |  |        |        |           |           |

## LAMPIRAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TAHUN 2016

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA   | Satuan         | Target | Realisasi | % Capaian |
|------------------|---|----------------|--------|-----------|-----------|
| 1.               | Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP   |                |        |           |           |
| 1.1              | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP  | Rekomendasi    | 108    | 108       | 100,00    |
| 1.2              | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita   | Rekomendasi    | 27     | 27        | 100,00    |
| 1.3              | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita                                      | Rekomendasi    | 4      | 4         | 100,00    |
| 1.4              | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP  | Rekomendasi    | 35     | 35        | 100,00    |
| 1.5              | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda   | Rekomendasi    | 2      | 2         | 100,00    |
| 2.               | Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan |                |        |           |           |
| 2.1              | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP   | laporan        | 80     | 80        | 100,00    |
| 3.               | Termanfaatkannya Aset secara optimal  |                |        |           |           |
| 3.1              | Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin                                   | Unit           | 11     | 11        | 100,00    |
| 3.2              | Rehabilitasi Gedung dan Bangunan  | m <sup>2</sup> | 820    | 820       | 100,00    |
|                  |   |                |        |           |           |

## LAMPIRAN PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN PROGRAM

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA  | Satuan | Capaian 2015 | Capaian 2016 | Kenaikan/ Penurunan |
|-----------------|--|--------|--------------|--------------|---------------------|
| 1.              | Perbaikan pengelolaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan negara/korporasi                       |        |              |              |                     |
| 1.1             | Perbaikan tatakelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern pengelolaan program nasional                     | %      | 188,56       | 126,98       | -61,58              |
| 1.2             | Persentase tindak lanjut rekomendasi tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi | %      | 94,12        | 100,00       | 5,88                |
| 1.3             | Penyerahan hasil pengawasan keinvestigasian kepada aparat penegak hukum  | %      | 100          | 166,67       | 66,67               |
| 2.              | Meningkatnya kualitas penerapan SPIP Pemda/korporasi   |        |              |              |                     |
| 2.1             | Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/kota (level 3)   | %      | 0            | 102,60       | 102,6               |
| 2.2             | Persentase BUMD yang kinerjanya minimal berpredikat baik dari BUMD yang dibina                                   | %      | -            | 147,92       | -                   |
| 2.3             | Presentase BLUD yang kinerjanya minimal baik dari BLUD yang dibina   | %      | -            | 172,41       | -                   |
| 3.              | Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern Pemda   |        |              |              |                     |
| 3.1             | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 3)   | %      | -            | 102,53       | -                   |
| 3.2             | Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi (Level 2)   | %      | -            | 100,00       | -                   |
| 3.3             | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 2)   | %      | -            | 100,00       | -                   |
| 3.4             | Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten/Kota (Level 1)   | %      | -            | 186,01       | -                   |
| 4.              | Meningkatnya kualitas pelayanan dukungan teknis dalam pengawasan BPKP  |        |              |              |                     |
| 4.1             | Persepsi kepuasan layanan kesesmaan (skala likert 1-10)  | skala  | 113,93       | 113,21       | -0,72               |
|                 |  |        |              |              |                     |



## LAMPIRAN PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA   | Satuan | Capaian 2015 | Capaian 2016 | Kenaikan/<br>Penurunan |
|------------------|---|--------|--------------|--------------|------------------------|
| 1.               | Tersedianya informasi hasil pengawasan pada Perwakilan BPKP   |        |              |              |                        |
| 1.1              | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP  | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
| 1.2              | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita   | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
| 1.3              | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita                                      | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
| 1.4              | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP  | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
| 1.5              | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda   | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
| 2.               | Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya dalam mencapai kepuasan layanan |        |              |              |                        |
| 2.1              | Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP   | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
| 3.               | Termanfaatkannya Aset secara optimal  |        |              |              |                        |
| 3.1              | Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana Peralatan dan Mesin                                   | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
| 3.2              | Rehabilitasi Gedung dan Bangunan  | %      | 100,00       | 100,00       | 0,00                   |
|                  |   |        |              |              |                        |

**LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI SASARAN PROGRAM 1 IKU 1**  
**Perbaikan Tatakelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Intern Pengelolaan Program Nasional**

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi  |                  |        |            | TL  | Ket |  |
|----|---|--------|----|--|------------------|--------|------------|---|-----|--|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian   | Ref              | ST     | Judul ST   |   |     |  |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5  | 6                | 7      | 8          | 9   | 10  |  |
| 1  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 1  | Melakukan konsultasi pemecahan permasalahan aplikasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan terkait kesalahan penggunaan akun Kas di Bendahara Pengeluaran – UP dengan akun Kas di Bendahara Pengeluaran – TUP  | LBA-34           | ST-46  | 22/01/2016 | Bimbingan Teknis Penyusunan LK pada Satker di Lingk. Mahkamah Agung RI tahun 2015 (unaudited) di Prov. Kalsel   | 1   |  |
|    |   |        |    | Melakukan konsultasi pemecahan permasalahan aplikasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan terkait adanya perbedaan penyajian klasifikasi akun pada aplikasi SAIBA dengan klasifikasi akun pada aplikasi SIMAK/Persediaan. Sedangkan untuk kepentingan pelaporan di neraca TA 2015 kami menyarankan agar melakukan jurnal reklasifikasi di dalam aplikasi SAIBA melalui menu jurnal umum |                  |        |            |   |     |  |
| 2  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 2  | Mendorong dan memantau tindakan koreksi yang diperlukan dalam rangka menjamin kualitas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM  | LBA-39           | ST-49  | 25/01/2016 | Bimtek Penyusunan LK di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2015 (unaudited) pada Prov. Kalimantan Selatan   | 1   |  |
| 3  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 3  | Koordinator Kopertis XI agar melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kemenristekdikti mengenai keterlambatan pencairan beasiswa bidikmisi semester gasal tahun 2016   | LPM-520, LPM-526 | ST-846 | 24/10/2016 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional atas Renaksi A.134, A.135, A.157, A.139, A.198 dan A.243 pada Kemensos serta Renaksi A.125 dan A.126 pada Kemendikbud di Kota Banjarmasin | 1   |  |
| 4  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 4  | Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan opname Kas pada Bendahara setiap bulannya dan menuangkannya ke dalam Berita Acara Penutupan Kas  | LBA-31           | ST-31  | 15/01/2016 | Pendampingan Penyusunan LK pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel   | 1   |  |
| 5  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 5  | Memperbaiki Sistem Pengendalian Intern atas Persediaan yang masih terdapat kelemahan, yaitu melakukan pembagian tugas secara tertulis (formal) antara fungsi pengadaan, penerimaan dan penyimpanan dalam pengelolaan persediaan  | LBA-21           | ST-32  | 15/01/2016 | Pendampingan Penyusunan LK pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata   | 1   |  |
|    |   |        |    | Melakukan pengelolaan persediaan dengan didukung dengan dokumen yang akuntabel   |                  |        |            |   |     |  |
|    |   |        |    | Mengusulkan penambahan jumlah pegawai kepada Gubernur Kalimantan Selatan melalui kepala BKD Provinsi Kalimantan Selatan atau melakukan perekrutan pegawai kontrak atau tenaga harian lepas sesuai kebutuhan baik dari segi jumlah maupun kompetensi yang diperlukan  |                  |        |            |   |     |  |
| 6  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 6  | Dibuatkan memo berita acara untuk pelaksanaan kegiatan, antara lain reklas antar akun, opname persediaan dll   | LBA-27           | ST-37  | 15/01/2016 | Pendampingan Penyusunan LK Smstr TA 2015 pada Satker Disnakertrans Prov. Kalsel   | 1   |  |

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi  |        |                   |  | TL | Ket |
|----|---|--------|----|--|--------|-------------------|--|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian   | Ref    | ST                | Judul ST   |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5  | 6      | 7                 | 8  | 9  | 10  |
| 7  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 7  | <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar menginstruksikan Kepala Satker PIP dan PPK untuk memerintahkan kepada 7 LKD agar menyetorkan uang sebesar Rp29.557.598,49 ke kas LKD dan menambah pekerjaan sesuai hasil musyawarah desa dengan dibuatkan RAB tambahan pekerjaan serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas perintah tersebut dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelompok Tani Dua Serangkai Desa Tawia Rp3.833.981,00</li> <li>- Kelompok Tani Panggang Utama Desa Tawia Rp721.125,00</li> <li>- LKD Karya Membangun Rp2.122.511,25</li> <li>- LKD Rakat Banar Rp2.122.511,25</li> <li>- LPM Ambutun Rp3.706.100,00</li> <li>- LKD Sangga Buana Rp15.148.913,24</li> </ul> | LAI-70 | ST-101 11/02/2016 | Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISEI) Loan JICA IP. 564 TA 2015 pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 1  |     |
|    |   |        |    | <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar Menginstruksikan Kepala Satker PIP dan PPK untuk memerintahkan LKD Kayu Abang agar menyetorkan sebesar Rp39.452.209,35 ke kas LKD dan memperbaiki pekerjaan sesuai spesifikasi teknis serta memantau pelaksanaan tindak lanjut perintah tersebut</p>   |        |                   |  |    |     |
|    |   |        |    | <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar Menginstruksikan Kepala Satker PIP dan PPK untuk memerintahkan kepada 4 LKD terkait agar menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp18.648.000,00 ke kas LKD dan menambah pekerjaan sesuai hasil musyawarah desa serta memantau pelaksanaan tindak lanjut perintah tersebut dengan rician LKD sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 LKD Karya Membangun Desa Angkinang Rp6.048.000,00</li> <li>2 Rakat Banar Desa Angkinang Rp6.048.000,00</li> <li>3 Kelompok Tani Dua Serangkai Desa Tawia Rp3.276.000,00</li> <li>4 Panggang Utama</li> </ul>   |        |                   |  |    |     |
|    |   |        |    | <p>Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar Menginstruksikan Kepala Satker PIP dan PPK untuk memerintahkan kepada 10 LKD untuk menyetorkan uang sebesar Rp2.500.000,00 ke kas LKD (Rp250.000 untuk masing-masing LKD) dan menambah pekerjaan sesuai hasil musyawarah desa serta memantau pelaksanaan tindak lanjut perintah tersebut</p>   |        |                   |  |    |     |
|    |   |        |    | <p>Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar Menginstruksikan Kepala Satker PIP dan PPK agar memerintahkan TtL untuk segera membuat as built drawing sesuai kondisi akhir fisik pekerjaan yaitu:LKD Kayu Abang, LKD Karya Membangun Desa Angkinang, LKD Rakat Banar Desa Angkinang, Kelompok Tani Dua Serangkai Desa Taiwa, Kelompok Panggang Utana Desa Taiwa, LKD Sangga Buana, LPM Mandala, LKD Pemuda Tani Pajar Harapan, Gapoktan Sama Rasa Desa Ambutun, LPM Ambutun</p>  |        |                   |  |    |     |

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi   |         |                   |   | TL | Ket |
|----|---|--------|----|---|---------|-------------------|---|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian  | Ref     | ST                | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5   | 6       | 7                 | 8   | 9  | 10  |
| 8  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 8  | Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai tengah melalui Kepala Satker PIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar memerintahkan KPP pada 7 Desa untuk segera menyusun rencana kerja dan selanjutnya melakukan pemeliharaan prasarana yang sudah dibangun   | LAI-68  | ST-102 11/02/2016 | Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISEI) Loan JICA IP. 564 TA 2015 pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 1  |     |
|    |   |        |    | Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Kepala Satker PIP Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar memerintahkan LKD Handil Qurban Desa Hantakan dan LKD BBERkas Bersama Desa Murung B untuk melakukan perbaikan JUT sesuai spesifikasi pada SP3  |         |                   |   |    |     |
|    |   |        |    | Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah melalui Kepala Satker PIP kabupaten Hulu Sungai Tengah agar memerintahkan kepada LKD pada 7 Desa tersebut agar melengkapi bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan ketentuan  |         |                   |   |    |     |
| 9  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 9  | Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Tabalong melalui Kepala Satker PIP memerintahkan kepada LKD Kelompok Tani Bangun Bersama Desa Garagata Kecamatan Jaro dan LKD PKK Desa Muara Uya kecamatan Muara Uya untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum dilaksanakan masing-masing sebesar Rp2.087.193,00 dan Rp923.542,00  | LAI-66  | ST-103 11/02/2016 | Audit Dukungan atas Laporan Keuangan Rural Settlement Infrastructure and Kabupaten Strategic Area Development (RSIKD/RISEI) Loan JICA IP. 564 TA 2015 pada Kabupaten Tabalong           | 1  |     |
| 10 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 10 | Kepada Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Selatan kami rekomendasikan agar Menarik kembali dana BLM komputer yang tidak sesuai peruntukannya sebesar Rp17.360.000,00 pada 20 BKM/LKM Kota Banjarbaru masing-masing sebesar Rp868.000,00 kemudian disetor ke Kas BKM/LKM, untuk dapat digunakan meningkatkan kapasitas komputer   | LAI-183 | ST-184 07/03/2016 | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan PNPMP Perkotaan Loan 8213 Prov Kalsel TA 2015   | 1  |     |
|    |   |        |    | Menginstruksikan kepada Koordinator LKM Bersama Membangun Banua Kelurahan Bangkal dan Ketua KSM Mangkih agar melakukan perbaikan/ penyempurnaan tembok penahan/siring dan pemasangan paving yang rusak atas pekerjaan RTH   |         |                   | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Balangan             |    |     |
|    |   |        |    | Menginstruksikan kepada koordinator LKM Bersama Membangun Banua Kelurahan Bangkal dan Ketua KSM Mangkih untuk memperbaiki atap perpustakaan yang bocor  |         |                   | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Banjar               |    |     |
|    |   |        |    | Kepada Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Selatan kami rekomendasikan agar Menginstruksikan kepada Ketua KSM Red Borneo agar melakukan penyempurnaan pekerjaan kurang jalan paving, pekerjaan cor lantai drainase dan perbaikan lebar paving yang kurang 1,5 m menjadi 1,5 m senilai Rp3.046.817.94 sesuai dengan gambar rencana |         |                   | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Tabalong             |    |     |

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi  |         |                   |   | TL | Ket |
|----|---|--------|----|--|---------|-------------------|---|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian   | Ref     | ST                | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5  | 6       | 7                 | 8   | 9  | 10  |
|    |   |        |    | Kepada Kepala Satker Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Provinsi Kalimantan Selatan kami rekomendasikan agar Menginstruksikan kepada Ketua KSM Madani untuk menyetor ke kas LKM Cempaka Maju sebesar Rp4.684.426,16 atas volume kurang jalan paving yang dikerjakan, untuk kemudian dimanfaatkan membangun infrastruktur lainnya yang dibutuhkan  |         |                   | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Batola                   |    |     |
| 11 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 11 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan agar menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP) Kabupaten Balangan agar Memerintahkan Ketua Satuan Pelaksana Pamsimas Desa Ajung agar melakukan penagihan pembayaran yang tidak sesuai prestasi/kelebihan pembayaran kepada CV. Perdana Putra sebesar Rp2.000.000,00 dan selanjutnya menyerahkan ke Kas KKM Desa Ajung untuk dimanfaatkan sesuai hasil musyawarah warga masyarakat.   | LAI-117 | ST-186 07/03/2016 | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Balangan                 | 0  |     |
|    |   |        |    | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan agar menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP) Kabupaten Balangan agar memerintahkan Ketua Satuan Pelaksana dan Koordinator KKM Desa Hauwai untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran dana BLM/Loan yang tidak sesuai ketentuan dengan menyetorkan dana sebesar Rp6.500.000,00 ke Kas KKM Desa Hauwai untuk dimanfaatkan sesuai hasil musyawarah warga masyarakat   |         |                   | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Grant IBRD No. TF 094792 pada Dinas Kesehatan Prov. Kalsel |    |     |
|    |   |        |    | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan agar menginstruksikan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP) Kabupaten Balangan agar Memerintahkan Tim Pengadaan, Ketua Satuan Pelaksana dan Koordinator KKM Desa Desa Ajung dan Desa Dayak Pitap untuk mempertanggungjawabkan kemahalan harga pengadaan pipa HDPE 100 NOD 63 Merk Maspion dengan menyetorkan dana masing-masing sebesar Rp1.696.500,00 dan Rp4.051.800,00 ke Kas KKM Desa Ajung dan Desa Dayak Pitap untuk dimanfaatkan sesuai hasil musyawarah warga masyarakat. |         |                   |   |    |     |
| 12 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 12 | Menginstruksikan PPK PAMSIMAS dan Fasilitator Teknik untuk memerintahkan dan membimbing KKM dalam membuat Berita Acara Revisi dan As Built Drawing yang terpasang serta memantau pelaksanaan tindak lanjut atas masalah tersebut   | LAI-115 | ST-180 07/03/2016 | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Banjar                   | 1  |     |
| 13 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 13 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong melalui Kepala Satuan Kerja PIP agar memerintahkan KKM agar menyetorkan kelebihan pembayaran ke kas KKM dan melaksanakan penambahan kegiatan yang mendukung pengembangan RKM sesuai dengan musyawarah desa di Desa Burum senilai Rp1.200.000,00, Desa Kupang Nunding senilai Rp1.297.000,00, Desa Masingai senilai Rp855.000,00, dan Desa Bangkiling senilai Rp1.125.000,00, serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya.   | LAI-122 | ST-179 07/03/2016 | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Tabalong                 | 1  |     |

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi   |         |                   |   | TL | Ket |
|----|---|--------|----|---|---------|-------------------|---|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian  | Ref     | ST                | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5   | 6       | 7                 | 8   | 9  | 10  |
|    |   |        |    | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong melalui Kepala Satuan Kerja PIP agar memerintahkan kepada 4 KKM tersebut untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp17.130.000,00 ke kas KKM dan melaksanakan tambahan kegiatan sesuai dengan musyawarah desa dengan rincian sebagai berikut:<br>KKM Karya Bersama / Desa Burum 1.300.000,00<br>KKM Tirta Jaya / Desa Kupang Nunding 2.810.400,00<br>KKM Sumber Agung / Desa Masingai II 7.140.000,00<br><del>KKM Tirta / Desa Panaliling 5.980.000,00</del>                               |         |                   |   |    |     |
|    |   |        |    | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tabalong melalui Kepala Satuan Kerja PIP agar memerintahkan kepada KKM Desa Kupang Nunding untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.696.448,00 ke kas KKM dan menambah pekerjaan sesuai hasil musyawarah desa serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya   |         |                   |   |    |     |
|    |   |        |    | Memerintahkan KKM/Satlak dan Fasilitator agar segera memperbaiki SPAM di Desa Burum dan melakukan uji fungsi fisik  |         |                   |   |    |     |
| 14 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 14 | Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala melalui Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten dan PPK PAMSIMAS agar memberikan teguran kepada Bendahara KKM Tirta Jaya dan memerintahkan bendahara mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada toko penyedia barang/material bahan bangunan senilai Rp2.053.000,00 untuk disetor ke Kas KKM Tirta Jaya. Serta memerintahkan KKM melakukan rebug warga penggunaan dana atas kelebihan pembayaran tersebut untuk pembangunan sarana air bersih dan sanitasi di desa | LAI-125 | ST-182 07/03/2016 | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Batola | 1  |     |
|    |   |        |    | Memerintahkan KKM Desa Murung Keramat dan Rangga Surya untuk melengkapi dokumen terkait penyediaan lahan yang dilakukan dengan cara hibah oleh masyarakat sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial PAMSIMAS 2015  |         |                   |   |    |     |
|    |   |        |    | Dinas Pekerjaan Umum melalui Kepala Satuan Kerja PIP Kabupaten dan PPK PAMSIMAS agar memerintahkan KKM Desa Murung Keramat, Danda Jaya dan Rangga Surya untuk segera memenuhi AD/ART dan SK Kepala Desa tentang Pengelola BPSPAMS   |         |                   |   |    |     |
| 15 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 15 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut agar menginstruksikan Kepala Satker PIP dan PPK untuk memerintahkan kepada 3 KKM agar menyetorkan uang sebesar Rp9.885.376,00 ke kas KKM dan menggunakan kas tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Penggunaan Kas tersebut serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya masing-masing KKM sebagai berikut:<br>KKM Suka Maju 900.000,00<br>KKM Miftahul Khair 4.602.461,00<br>KKM Tirta Asri 4.382.915,00  | LAI-132 | ST-178 07/03/2016 | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Loan IBRD No.8259 ID TA 2015 Kab. Tala   | 0  |     |
|    |   |        |    | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Kerja PIP Kabupaten Tanah Laut agar Melaporkan kepada Tim Pokja Kabupaten atas permasalahan tersebut supaya dapat dilakukan koordinasi dengan Kepala Cabang PLN Rayon Pelaihari sehingga pekerjaan sarana air minum dapat difungsikan/dimanfaatkan oleh masyarakat  |         |                   |   |    |     |

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi  |         |                   |   | TL | Ket |
|----|---|--------|----|--|---------|-------------------|---|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian   | Ref     | ST                | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5  | 6       | 7                 | 8   | 9  | 10  |
|    |   |        |    | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Kerja PIP Kabupaten Tanah Laut agar: a. KKM Sungai Cuka bersama Sanitarian dan STBM agar segera melakukan Uji Sampel Air Pasca dan menyampaikan hasil uji dan simpulan tersebut kepada masyarakat.<br>b. KKM Sungai Cuka didampingi Fasilitator Masyarakat agar segera melakukan koordinasi dengan Sanitarian dan STBM untuk menindaklanjuti hasil uji sampel air tersebut   |         |                   |   |    |     |
|    |   |        |    | Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut melalui Satuan Kerja PIP Kabupaten Tanah Laut agar menginstruksikan kepada BPSPAMS untuk melaksanakan tugasnya yaitu:<br>a. Menyelenggarakan rapat pengurus dan rapat dengan anggota masyarakat pengguna manfaat sarana dan prasarana air minum dan sanitasi secara berkala, menyusun pelaporan dan pertanggung jawaban pengurus BPSPAMS.<br>b. Menyusun rencana kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. |         |                   |   |    |     |
| 16 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 16 | Memerintahkan PPK P2PL Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk menarik kembali pembayaran yang tidak sesuai realisasi kegiatan serta menyetorkannya ke Kas Negara sebesar Rp8.875.000,00   | LAI-139 | ST-183 07/03/2016 | Audit Independen Dukungan atas Laporan Keuangan Pamsimas Third Water Supply and Sanitation for Low Income Communities (WSSLIC-3) Grant IBRD No. TF 094792 pada Dinas Kesehatan Prov. Kalsel | 1  |     |
|    |   |        |    | Memerintahkan Tim Teknis Progam PAMSIMAS II untuk menyusun petunjuk pertanggungjawaban penggunaan dana kegiatan STBM yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten/Kecamatan  |         |                   |   |    |     |
| 17 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 17 | Melakukan koordinasi dengan Perum Bulog terkait dengan penyaluran raskin   | LPM-217 | ST-358 10/05/2016 | Monev Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional di Kota Banjarmasin   | 1  |     |
| 18 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 18 | membuat perencanaan/timeline masing-masing kegiatan peningkatan kemampuan bagi petugas pelaksana rehabilitasi dalam tahun 2016 sehingga mengakomodir kegiatan peningkatan lainnya yang belum dilaksanakan  | LPM-337 | ST-571 25/06/2016 | Monev Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional atas Renaksi A.320 pada BNN Provinsi Kalimantan Selatan   | 1  |     |
| 19 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 19 | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Barito Kuala agar segera menyelesaikan proses verifikasi usulan/proposal Kelompok Tani calon penerima bantuan alsintan Hand Tractor roda 2 dan pompa air 4 inchi dan selanjutnya menyerahkan alsintan kepada Kelompok Tani yang memenuhi persyaratan  | LPM-344 | ST-573 25/06/2016 | Monev Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional atas Renaksi A.134, A.135, Kementerian Sosial serta P1A1, P4A7, P152A1 Kementerian Pertanian pada Kab. Batola                     | 1  |     |
| 20 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 20 | Memerintahkan PjOK dan BPP untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran kegiatan rapat sebesar Rp29.760.000,00   | LAO-365 | ST-540 14/07/2016 | Audit Operasional atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Kegiatan Penguatan Kelembagaan Tahun Anggaran 2015 pada BPBD Kabupaten Barito Kuala  | 0  |     |
|    |   |        |    | Memerintahkan PjOK dan BPP untuk melakukan pengembalian ke Kas Negara atas pengeluaran belanja barang persediaan untuk konsumsi yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp6.000.000,00   |         |                   |   |    |     |

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi  |                  |                    |   | TL | Ket |
|----|---|--------|----|--|------------------|--------------------|---|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian   | Ref              | ST                 | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5  | 6                | 7                  | 8   | 9  | 10  |
|    |   |        |    | Memerintahkan PjOK dan BPP untuk melakukan penyetoran ke Kas Negara atas kelebihan pembayaran kegiatan lokakarya tersebut sebesar Rp12.820.000,00  |                  |                    |   |    |     |
| 21 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 21 | memberikan teguran kepada pelaksana monitoring dan evaluasi Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan atas kegiatan penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran alokan dan non alokan pada SKPD-KB Kota Banjarbaru  | LHA-530          | ST-752 26/09/2016  | Audit Kinerja atas Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Tahun 2015   | 0  |     |
|    |   |        |    | memberikan surat teguran kepada Tim Pengendali DAK Bidang KB-KR Provinsi Kalimantan Selatan atas kelalaiannya tidak optimal melaksanakan evaluasi pelaksanaan DAK  |                  |                    |   |    |     |
| 22 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 22 | Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan melalui BNN Pusat agar mengeluarkan sertifikat terkait kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan   | LPM-516, LPM-549 | ST-847 24/10/2016  | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional KSP J-25 Narkoba dan Psicotropika pada BNN Provinsi Kalimantan Selatan dan J6-Pendidikan Kantor Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan | 1  |     |
| 23 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 23 | Kepada Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) - Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin kami sarankan untuk segera memerintahkan masing-masing Ketua Peneliti sebagaimana dimaksud dan menyerahkan laporan hasil penelitian, karena telah melampaui batas waktu yang telah dimerinciakan/kontrak  | LPM 41-48,55     | ST-54 25/01/2016   | Monev Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional atas Renaksi A.1, A.48, A.50, A.51, A.57, A.61, dan A.88 pada Kota Banjarmasin  | 1  |     |
| 24 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 24 | 1. Memerintahkan pengelola KIP untuk melengkapi syarat pengambilan sesuai SK daftar penerima yang diterbitkan oleh Pusat<br>2. Menyampaikan laporan penyaluran bantuan sosial PIP ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin<br>3. Menginstruksikan bendahara sekolah untuk menyetorkan jasa gito ke Kas Negara<br>4. Mempercepat proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima | LR-625           | ST-1018 07/12/2016 | Reviu Tata Kelola Proyek Strategis Nasional (PSN) Triwulan IV Tahun 2016 atas Proyek Pembangunan Bendungan Tapin di Kab. Tapin  | 0  |     |
| 25 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 25 | memerintahkan kontraktor untuk melakukan kewajiban sesuai Surat Perjanjian, yaitu termasuk pendistribusian bibit, sarana dan prasarana, karena kendala kondisi jalan yang sulit dilalui bukan merupakan force majeure  | LPM-519, LPM-529 | ST-843 24/10/2016  | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional atas Renaksi A.223 Kementerian LHK di Balai Pengelolaan DAS Barito  | 1  |     |
| 26 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 26 | Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan agar mengusulkan kepada Gubernur Kalimantan Selatan untuk membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)  | LPM-569          | ST-886 04/11/2016  | Monitoring dan Evaluasi atas Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan TKDN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Pertanian TPH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2016         | 0  |     |
|    |   |        |    | Menyelenggarakan pelatihan penyusunan RUP dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014   |                  |                    |   |    |     |



| No | IKK   |        |    | Rekomendasi   |                  |                   |   | TL | Ket |
|----|---|--------|----|---|------------------|-------------------|---|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian  | Ref              | ST                | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5   | 6                | 7                 | 8   | 9  | 10  |
| 27 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | IPP    | 27 | Menyurati pendamping pelaksanaan bantuan UEP korban penyalahgunaan NAPZA di kota Banjarbaru dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengirim laporan kegiatan pendampingan yang telah dilakukan   | LPM-515, LPM-546 | ST-848 24/10/2016 | Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Prioritas Nasional KSP J-25 Narkoba dan Psikotropika pada BNN Kota Banjarmasin dan J6-Pendidikan Kantor Kemenag Kota Banjarmasin | 1  |     |
| 28 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 28 | Melakukan evaluasi berkala terhadap penyerapan anggaran pada tingkat SKPD, dan melakukan revisi anggaran yang diperlukan pada saat perubahan agar penyerapan angaran optimal.   | LEV-76           | 77 02/02/2016     | EPA s.d semester II tahun 2015 pada Pemkab. Tapin   | 1  |     |
| 29 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 29 | Mengintensifkan penyuluhan atau kampanye dalam rangka mencapai target kinerja 95% masyarakat memiliki pengetahuan tentang HIV   | LEV-230          | 311 15/04/2016    | Evaluasi Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah atas Program Pemberantasan Penyakit Menular pada Pemerintah Kota Banjarbaru   |    |     |
| 30 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 30 | Meninjau ulang spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam tender/dokumen lelang   | LR-310           | 576 25/07/2016    | Reviu PBJ dan Reviu Penyerapan Anggaran Triwulan II Tahun 2016 pada Provinsi Kalimantan Selatan   |    |     |
| 31 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 31 | Mengupdate pedoman reviu dengan peraturan terbaru dan melaksanakan kegiatan reviu RKPd Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2017  | LBA-274          | 502 17/06/2016    | Bimbingan Teknis Reviu RKA pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut  | 1  |     |
| 32 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 32 | Melaksanakan kegiatan reviu RKPd Tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dalam butir IV.                                  | LBA-272          | 499 15/06/2016    | Bimbingan Teknis Reviu RKA pada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah  | 1  |     |
| 33 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 33 | Melaksanakan kegiatan reviu RKA SKPD/PPKD Tahun 2017 dan reviu RKPd Tahun 2017  | LBA-464          | 754 26/09/2016    | Bimbingan Teknis Reviu RKA pada Inspektorat Kota Banjarbaru   | 1  |     |
| 34 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 34 | Segera dilakukan perubahan pada kontrak bila terjadi perubahan spesifikasi dan kondisi lapangan, serta segera melakukan koordinasi secara aktif dengan instansi yang berwenang untuk masalah pembebasan tanah.                                | LR-309           | 577 25/07/2016    | Reviu PBJ, Penyerapan Anggaran dan Monitoring Dana Desa Triwulan II 2016 pada Kota Banjarmasin  |    |     |
| 35 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 35 | Atas belum maksimalnya realisasi pengadaan barang dan jasa pada Pemerintah Kota Banjarmasin adalah agar secepatnya melaporkan pengadaan ke-LPSE dan melakukan percepatan proses pengadaan.  | LR-493           | 818 14/10/2016    | Evaluasi Penyerapan Anggaran Pemda TW III TA 2016   | 1  |     |
| 36 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 36 | Menyusun dokumen daftar risiko dan mengidentifikasi risiko serta melakukan pendataan secara berkelanjutan terhadap objek pajak restoran dan pajak hiburan potensial yang masih bisa digali.   | LEV-283          | 392 17/05/2016    | Pengawasan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemkab. Tanah Bumbu   |    |     |
| 37 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 37 | Melakukan penghitungan potensi pajak daerah sebagai dasar penetapan target penerimaan pajak daerah serta melakukan sosialisasi terhadap WP Hotel guna meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPTPD sesuai omzet yang sebenarnya. | LEV-390          | 398 08/05/2016    | Pemetaan (Mapping) Potensi PAD Kab. Hulu Sungai Tengah  |    |     |

| No | IKK   |        |    | Rekomendasi  |         |                |  | TL | Ket |
|----|---|--------|----|--|---------|----------------|--|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No | Uraian   | Ref     | ST             | Judul ST   |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4  | 5  | 6       | 7              | 8  | 9  | 10  |
| 38 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 38 | Menyusun basis data potensi pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai dasar penentuan target pendapatan, dan meninjau kembali Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah apakah masih relevan dengan kondisi saat ini atau perlu dilakukan pembaruan  | LHE-312 | 397 18/05/2016 | Pemetaan (Mapping) Potensi PAD Kab. Tabalong   |    |     |
| 39 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 39 | Menyusun database potensi pajak hotel sebagai dasar dalam menetapkan target pendapatan pajak hotel dan mengintensifkan penagihan pajak hotel.  | LEV-370 | 394 17/05/2016 | Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pemko Banjarbaru  |    |     |
| 40 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 40 | 1. Memperbaiki atau melakukan update database potensi pajak daerah maupun retribusi daerah sehingga lebih menggambarkan potensi riil sebagai dasar penentuan target pendapatan.<br>2. Meningkatkan integritas instansi dan SDM yang mengelola pajak dan retribusi untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam rangka pelayanan pemungutan pajak dan retribusi                                    | LBA-278 | 426 24/05/2016 | Monitoring TL Pemetaan (Mapping) Potensi PAD pada Kota Banjarmasin   | 1  |     |
| 41 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 41 | Melakukan validasi atas piutang pajak dan piutang retribusi untuk dapat meyakini piutang tersebut dapat ditagih.   | LAP-438 | 700 05/09/2016 | Pengolahan Kompilasi & AKPPD Satwil Prov. Kalsel   |    |     |
| 42 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 42 | Direktur RSUD Datu Sanggul Kabupaten Tapin agar menganggarkan kembali pengadaan peralatan kesehatan yang berasal dari dana DAK TA 2015 pada TA 2017.   | LPM-609 | 828 17/10/2016 | Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Tapin               |    |     |
| 43 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 43 | Atas kelebihan pembayaran pada DAK TUD 2015 Bidang Infrastruktur Irigasi sebesar Rp27.121.217,50, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan menyetor ke rekening Kas Daerah sebesar Rp27.121.217,50   | LHM-64  | 121 16/02/2016 | Monev DAK TUD TA 2015 pada Pemkab. HST   |    |     |
| 44 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 44 | a. Kepala SMKN 1 Kandungan dan SMKN 2 Kandungan agar menyetorkan kelebihan pembayaran masing-masing sebesar Rp4.203.210,00 dan Rp5.014.042,00 ke Kas Daerah<br>b. Kepala SDN Pariangan dan SMKN 1 Kandungan agar mengganti pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknisnya.<br>c. PPTK agar menagih kelebihan pembayaran sebesar Rp4.805.000,00 kepada kontraktor pelaksana CV. SHINTA dan menyetorkan ke Kas Daerah | LPM-607 | 829 17/10/2016 | Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |    |     |
| 45 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 45 | a. Kepala SDN Sugai Malang 4 Amuntai agar mempertanggungjawabkan pengeluaran tersebut dengan menyetor ke Kas Daerah sebesar Rp4.475.000,00.<br>b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut, dan memberikan teguran tertulis kepada konsultan, konsultan pengawas, dan PPTK yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.   | LPM-605 | 827 17/10/2016 | Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara   |    |     |
| 46 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | APD    | 46 | Menyampaikan laporan sementara atas hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD) kepada inspektorat dan sekretaris daerah  | LAP-477 | 740 19/09/2016 | Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah   | 1  |     |

| No | IKK  |        |    | Rekomendasi  |   |                   |  | TL | Ket |
|----|--|--------|----|--|---|-------------------|--|----|-----|
|    | Uraian   | Bidwas | No | Uraian   | Ref   | ST                | Judul ST   |    |     |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5  | 6   | 7                 | 8  | 9  | 10  |
| 47 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | APD    | 47 | a. PT Putra Balangan Bangun Persada agar mengembalikan/menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pembangunan Pasar Bihara sebesar Rp47.958.528,79 ke Kas Daerah.<br>b. PT Karya Kompas Konsultan agar mengembalikan/menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan perencanaan pembangunan Pasar Bihara sebesar Rp10.600.000,00 ke Kas Daerah.  | LAO-108   | 125 16/02/2016    | Audit Operasional atas Hasil Pekerjaan Pembangunan Pasar Bihara Kec. Awayan Kab. Balangan TA 2015  | 1  |     |
| 48 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | APD    | 48 | Segera melakukan update aplikasi SIMDA Keuangan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016  | LBA-523   | 806 11/10/2016    | mengikuti Workshop/ Sosialisasi Pelaksanaan Update Aplikasi SIMDA Keuangan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 di Aula Barakat Setda Kabupaten Baniar          | 1  |     |
| 49 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | APD    | 49 | LEV-492:<br>a. Segera mengembalikan dana Silpa 2015 sebesar Rp22.706.396,00 ke Rekening Kas Desa dan bukti setor serta foto copy buku rekening kas agar disampaikan ke Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan. Atas rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan melakukan penyetoran sebesar Rp22.706.500,00 ke Rekening Kas Desa pada tanggal 21 Oktober 2016.<br>b. Segera menyetorkan pajak dari kegiatan tahun 2016 adalah sebesar Rp17.821.009,00 ke Kas Negara. | LEV-492   | 831 17/10/2016    | Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tw III 2016 & Silpa Dana Desa Thn 2015 Kab. Hulu Sungai Utara  | 1  |     |
| 50 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | APD    | 50 | Aparat Pemerintah Desa Awayan lebih mencermati kegiatan Pengadaan Lampu Tenaga Surya dengan pagu anggaran Rp150.000.000,00 yang direncanakan dilakukan oleh rekanan/pihak ketiga, agar dalam pelaksanaannya mengikuti kaedah pengadaan barang/jasa sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2013   | LEV-494   | 830 17/10/2016    | Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tw III 2016 & Silpa Dana Desa Thn 2015 Kab. Balangan   |    |     |
| 51 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 51 | Terdapat koreksi atas Tunjangan Profesi Guru   | LHV-89;90;91;92;93;94                                 | ST-137 23/02/2016 | Verifikasi Tunggakan TPG Kantor Kemenag TA 2013 s/d 2015 Per 31 Desember 2015 Pada Kantor Kemenag Kab. Barito Kuala, Kab. Baniar dan Kota Baniarbaru     | 1  |     |
| 52 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 52 | Terdapat koreksi atas Tunjangan Profesi Guru   | LHV-98 (Bjb);<br>LHV-99 (Banjar);<br>LHV-101 (Batola) | ST-138 23/02/2016 | Verifikasi Tunggakan TPG Kantor Kemenag TA 2013 s/d 2015 Per 31 Desember 2015 Pada Kantor Kemenag Kab. Tabalong, Balangan, HSU, HST, HSS, dan Tapin      | 1  |     |
| 53 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 53 | Terdapat koreksi atas Tunjangan Profesi Guru   | LHV-96 (Tanbu);<br>LHV-97 (Tala);<br>LHV-100 (Bim)    | ST-136 23/02/2016 | Verifikasi Tunggakan TPG Kantor Kemenag TA 2013 s/d 2015 Per 31 Desember 2015 Pada Kantor Kemenag Kota Banjarmasin, Kab. Tanah Laut dan Kab. Tanah Bumbu | 1  |     |
| 54 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 54 | Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pendataan jumlah kekurangan fasilitas dan peralatan kesehatan serta jumlah anggaran yang dibutuhkan pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Tabalong  | LAK-235   | ST-253 30/03/2016 | Audit Kinerja Program JKN TA 2015 pada Kab. Tabalong   | 1  |     |

| No | IKK  |        |    | Rekomendasi  |         |                   |   | TL | Ket |
|----|--|--------|----|--|---------|-------------------|---|----|-----|
|    | Uraian   | Bidwas | No | Uraian   | Ref     | ST                | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5  | 6       | 7                 | 8   | 9  | 10  |
| 55 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 55 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah kami rekomendasikan agar segera mengajukan penggunaan dana SILPA tersebut pada APBD Perubahan Tahun 2016   | LAK-236 | ST-252 30/03/2016 | Audit Kinerja Program JKN TA 2015 pada Kab. HST   | 1  |     |
|    |  |        |    | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bersama dengan Direktur Rumah Sakit H. Damanhuri Barabai dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai, untuk membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah            |         |                   |   |    |     |
|    |  |        |    | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah menginformasikan kepada Kepala BPJS Kesehatan Cabang Barabai perihal dokter keluarga yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama                                    |         |                   |   |    |     |
| 56 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 56 | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar agar menyampaikan surat himbauan kepada RSUD Ratu Zalecha agar menerapkan sistem rujukan dan rujukan balik sesuai ketentuan  | LAK-237 | ST-254 30/03/2016 | Audit Kinerja Program JKN TA 2015 pada Kab. Banjar  | 1  |     |
| 57 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 57 | Melaporkan kurangnya tenaga kesehatan di RSUD Brigjend. H. Hasan Basry pada Bupati Hulu Sungai Selatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan  | LAK-238 | ST-251 30/03/2016 | Audit Kinerja Program JKN TA 2015 pada Kab. HSS   | 1  |     |
| 58 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 58 | Memberikan teguran kepada petugas surveillance atas kelalaiannya dalam melaporkan kasus suspect campak   | LAK-531 | ST-765 27/09/2016 | Audit Kinerja Aksesibilitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan di DTPK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015   | 1  |     |
| 59 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 59 | kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memerintahkan KUBE segera menyusun pembagian tugas antar anggota  | LAK-403 | ST-644 18/08/2016 | Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) Kemensos RI pada Dinsosnakertrans pada Kab. HSS | 0  |     |
|    |  |        |    | Kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memerintahkan kepada Pengurus KUBE agar melaksanakan/memungut IKS dan melaksanakan pertemuan rutin setiap bulan  |         |                   |   |    |     |
|    |  |        |    | kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memerintahkan kepada Pengurus KUBE agar melakukan musyawarah dan membuat Berita Acara Pergantian Anggota KUBE apabila terdapat penggantian anggota KUBE |         |                   |   |    |     |
|    |  |        |    | kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar meningkatkan monitoring kegiatan KUBE dan membuat laporan lengkap dengan aspek-aspeknya   |         |                   |   |    |     |
|    |  |        |    | kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar memberikan pembinaan secara aktif kepada KUBE sehingga kegiatan usaha dapat berkembang untuk menambah penghasilan anggota KUBE                           |         |                   |   |    |     |
|    |  |        |    | Kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar membuat rencana kemitraan dengan pihak terkait untuk mengembangkan usaha KUBE  |         |                   |   |    |     |

| No | IKK  |        |    | Rekomendasi  |          |                    |   | TL | Ket |
|----|--|--------|----|--|----------|--------------------|---|----|-----|
|    | Uraian   | Bidwas | No | Uraian   | Ref      | ST                 | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5  | 6        | 7                  | 8   | 9  | 10  |
| 60 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 60 | Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara agar melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemberian motivasi kepada KUBE.   | LAK-401  | ST-645 18/08/2016  | Audit Kinerja Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Kegiatan Ekonomi melalui Kelompok Usaha Ekonomi Bersama (KUBE) Kemensos RI pada Dinsosnakertrans pada Kab. HSU | 0  |     |
|    |  |        |    | Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara agar membuat rencana target kemitraan KUBE untuk mengembangkan usaha KUBE  |          |                    |   |    |     |
|    |  |        |    | Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara agar Membuat SOP/Kebijakan/Pedoman mekanisme pemantauan keberlanjutan program KUBE   |          |                    |   |    |     |
| 61 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 61 | Rektor Universitas Lambung Mangkurat agar memerintahkan Tim Satuan Pengawas Intern (SPI) Universitas Lambung Mangkurat melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan Aset Tetap khususnya Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dengan periode 1 semesteran  | LATT-525 | ST-800 07/10/2016  | Audit Aset Bermasalah pada Universitas Lambung Mangkurat  | 0  |     |
|    |  |        |    | Memerintahkan Kepala Biro Umum dan Keuangan agar:<br>a. Melakukan reklasifikasi Gedung/Bangunan yang telah selesai pengerjaannya ke dalam akun yang sesuai dalam akun pos asset tetap Rp1.875.329.840,00;<br>b. Mengeluarkan dari akun neraca (KDP) atas 2 item pekerjaan yang masih berupa dokumen perencanaan yang pembangunannya dihentikan secara permanen dengan mereklasifikasi ke Akun Biaya Operasional Rp1.240.628.000,00;<br>c. Menelusuri item pekerjaan Ruang Kuliah Fakultas Teknik dan melakukan reklasifikasi ke Akun Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp890.101.090,00;<br>d. Melakukan reklasifikasi pencatatan atas Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Laboratorium PGSD PAUD Rp441.229.650,00 ke akun yang benar. |          |                    |   |    |     |
|    |  |        |    | Memerintahkan Kepala Biro Umum dan Keuangan bersama pihak terkait, baik Rektorat maupun Fakultas, untuk melakukan penilaian ulang struktur Gedung/Bangunan yang mengalami kerusakan untuk digunakan sebagai dasar pengajuan usulan anggaran pembangunan lanjutan.  |          |                    |   |    |     |
| 62 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 62 | Melakukan pendataan/perhitungan jumlah kebutuhan pupuk untuk pertanian pada 13 kabupaten/kota  | LHM-368  | ST-482 13/06/2016  | Monitoring dan Evaluasi Program Ketahanan Pangan Triwulan I dan II Tahun 2016 di Provinsi Kalsel  | 1  |     |
| 63 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 63 | Melengkapi berita acara penyerahan benih/pupuk secara memadai  | LHV-642  | ST-1012 06/12/2016 | Verifikasi Pembayaran Kontrak Tunda Bayar dan Pembayaran Tunggakan Kementerian Pertanian di Prov. Kalsel  | 1  |     |
| 64 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 64 | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu agar menginformasikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa penetapan penerima bantuan sarana penangkapan ikan tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu mendahului verifikasi bahan/berkas usulan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, dan belum dilakukan validasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan.  | LEV-578  | ST-884 04/11/2016  | Evaluasi atas Pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan (Kemaritiman) tahun 2016 di Kabupaten Tanah Bumbu   | 0  |     |

| No | IKK  |        |    | Rekomendasi   |                  |                   |  | TL | Ket |
|----|--|--------|----|---|------------------|-------------------|--|----|-----|
|    | Uraian   | Bidwas | No | Uraian  | Ref              | ST                | Judul ST   |    |     |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5   | 6                | 7                 | 8  | 9  | 10  |
|    |  |        |    | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu agar memberikan pengawalan serah terima barang sehingga barang tersebut diterima oleh Koperasi Anugerah Berhasil Batulicin sesuai kontrak.  |                  |                   |  |    |     |
| 65 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 65 | 1. Menghitung, memungut dan menyetorkan ke Kas Negara kewajiban pajak atas pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan<br>2. Menghitung dan menyetorkan jasa giro ke kas negara setelah pekerjaan selesai<br>3. Melakukan konsultasi ke Dinas Pendidikan Kab Banjar mengenai permasalahan KIP dan Bantuan PIPP   | LHM-602          | ST-885 04/11/2016 | Monitoring atas Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar  | 0  |     |
| 66 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 66 | 1. Memerintahkan pengelola KIP untuk melengkapi syarat pengambilan sesuai SK daftar penerima yang diterbitkan oleh Pusat<br>2. Menyampaikan laporan penyaluran bantuan sosial PIP ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin<br>3. Menginstruksikan bendahara sekolah untuk menyetorkan jasa gito ke Kas Negara<br>4. Mempercepat proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima                    | LLWAS-606        | ST-880 03/11/2016 | Monitoring atas Bantuan Pemerintah dan Bantuan Sosial Tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin  | 0  |     |
| 67 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | IPP    | 67 | Menyarankan kepada Bupati Hulu Sungai Tengah agar penyaluran Raskin memperhatikan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 400/65/401/Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Program Raskin di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan memenuhi 6 T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Harga, Tepat Waktu dan Tepat Administrasi).   | LPM-338; LPM-339 | ST-572 25/06/2016 | Monev Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional atas Renaksi A.134, A.135, Kementerian Sosial, P4A7, P152A1 Kementerian Pertanian pada Kab. HST serta Renaksi P1A1 Kab. Tabalong | 1  |     |
| 68 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | APD    | 68 | Menuangkan seluruh indikator SPM dalam dokumen Renstra 2016 - 2021 serta menuangkan dan menetapkan target pencapaian SPM dalam dokumen Renja dan RKA/DPA-Dinas Pendidikan   | LAK-279          | 239 23/03/2016    | Audit Kinerja Bidang Pendidikan pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  |    |     |
|    |  |        |    | Menuangkan SPM Bidang Pendidikan dalam dokumen perencanaan (RPJMD) Tahun 2016 - 2020  | LAK-436          | 492 15/06/2016    | Audit Kinerja Bidang Pendidikan pada PemKot Banjarbaru   |    |     |
| 69 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | APD    | 69 | PPK agar segera meminta program mutu/pemutakhiran program mutu kepada Penyedia Jasa Konstruksi  | LBA-422          | 427 24/05/2016    | Melakukan Probit Audit atas Pekerjaan Rehabilitasi Berat Gedung Puskesmas Liang Anggang  |    |     |
| 70 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | APD    | 70 | Meningkatkan upaya penyelesaian proses hibah pelabuhan dari provinsi ke kabupaten sehingga perbaikan dapat segera dilakukan   | LAK-284          | 393 17/05/2016    | Audit Kinerja Pelayanan Pemerintah Daerah Bidang Kemaritiman pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu   |    |     |
|    |  |        |    | a. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu melakukan pengecekan kembali terhadap persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin SIUP, SIPI, dan SIKPI<br>b. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika melakukan pengecekan kembali terhadap persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pengurusan izin Pas Kecil, Surat Registrasi Kapal, dan Sertifikasi Kemampuan Kapal | LAK-366          | 463 09/06/2016    | Audit Kinerja Bidang Kemaritiman pada Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015  |    |     |
| 71 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | APD    | 71 | Kepala Badan Penanaman Modal & Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin untuk segera membuat SOP terkait pemberian perizinan di bidang kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku   | LAK-305          | 389 16/05/2016    | Audit Kinerja Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2015  |    |     |

| No | IKK  |        |    | Rekomendasi   |           |                   |  | TL | Ket    |
|----|--|--------|----|---|-----------|-------------------|--|----|--------|
|    | Uraian   | Bidwas | No | Uraian  | Ref       | ST                | Judul ST   |    |        |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5   | 6         | 7                 | 8  | 9  | 10     |
| 72 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita)             | APD    | 72 | Membuat rencana strategis terkait program pemberdayaan pasar tradisional dan menyusun rancangan kebijakan terkait upaya perbaikan dan peningkatan interaksi sosial budaya antara pemangku kepentingan, pelaku usaha dan konsumen yang kemudian ditetapkan oleh Bupati   | LEV-576   | 782 03/10/2016    | Evaluasi Program Lintas Sektor Pemberdayaan Ekonomi Lokal/Pemberdayaan Pasar Tradisional (Pasar Rakyat) pada Pemerintah Kabupaten Banjar   |    |        |
| 73 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita)             | APD    | 73 | Membuat aturan khusus mengenai kebijakan pemanfaatan aset daerah dan kebijakan Kerja Sama Daerah (KSD), berikut SOP nya.  | LEV-473   | 651 19/08/2016    | Pengawasan Intern Program Lintas Sektor Pembangunan Daerah (PLSPD) atas Pengelolaan Kerjasama Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu |    |        |
| 74 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita | IPP    | 74 | Direkomendasikan kepada Kepala BPBD Kab. Tabalong agar memerintahkan PPK dan Konsultan Pengawas untuk memperhitungkan kembali kekurangan volume sebesar 39,90m3 pada saat pelaksanaan pekerjaan berlangsung sebesar Rp33.932.874,2 atas pekerjaan Normalisasi dan Perbaikan darurat sirngg/dinding penahan tanah (jalur 10 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak                      | LEV-626   | 1021 07/12/2016   | Evaluasi pengelolaan dana hibah bencana APBN Tahun 2016 Kabupaten Tabalong   |    |        |
| 75 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita | APD    | 75 | Seluruh pimpinan SKPD agar menyusun rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko atas kegiatan utama yang ditetapkan secara formal   | LEV-619   | 946 23/11/2016    | Penilaian (Assesment) Maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Banjarmasin  | 1  |        |
| 76 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita | AN     | 76 | Menetapkan struktur dan personil terkait pengelolaan barang milik perusahaan dan disesuaikan dengan nomenklatur jabatan/pengelola dalam pedoman Manajemen Aset<br>Mengembangkan lebih lanjut pedoman pengelolaan aset/barang milik perusahaan dengan penyusunan Standard Operating Procedures (SOP) baku yang lebih detail, setelah ada ketetapan atas pedoman Manajemen Aset | LBA - 475 | ST-712 07/09/2016 | Laporan hasil pengawasan telah disampaikan kepada BUMN/BUMD/RSUD dan PD lain sesuai permintaan yang bersangkutan                           | 1  |        |
| 77 | Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita | P3A    | 77 | Melakukan revisi tindak untuk mencapai kapabilitas APIP level 2   | LBA-624   | ST-918 16-Nop-16  | Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atau Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kab. Barito Kuala   |    |        |
|    |  |        |    | 77  |           |                   |  | 44 | 57,14% |

Target 45%  
Capaian 126,98%

**LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI SASARAN PROGRAM 1 IKU 2**  
**Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi**

| No | IKK  |        |    | Rekomendasi   |           |                     |   | TL | Ket |
|----|--|--------|----|---|-----------|---------------------|---|----|-----|
|    | Uraian   | Bidwas | No | Uraian  | Ref       | ST                  | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5   | 6         | 7                   | 8   | 9  | 10  |
| 1  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 78 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 136 | ST-176 07/03/2016   | Evaluasi Kinerja PDAM Intan Banjar  | 1  |     |
| 2  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 79 | mengurangi kebocoran  | LEV - 220 | ST - 255 31/03/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Bandarmasih   | 1  |     |
| 3  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 80 | Melakukan efisiensi biaya operasional.  | LEV - 207 | ST - 302 14/04/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Balangan  | 1  |     |
| 4  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 81 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 172 | ST - 248 30/03/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Barito Kuala  | 1  |     |
| 5  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 82 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 213 | ST - 270 06/04/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan   | 1  |     |
| 6  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 83 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 197 | ST - 294 12/04/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah  | 1  |     |
| 7  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 84 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 177 | ST - 249 30/03/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara   | 1  |     |
| 8  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 85 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 212 | ST - 315 21/04/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Kotabaru  | 1  |     |
| 9  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 86 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 219 | ST - 303 14/04/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tabalong  | 1  |     |
| 10 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 87 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 143 | ST - 243 28/03/2016 | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanah Bumbu   | 1  |     |
| 11 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 88 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target RPJMN  | LEV - 141 | ST-190 08/03/2016   | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tanah Laut  | 1  |     |
| 12 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 89 | meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat sesuai target MDG's tahun 2015 sebesar 68,87%  | LEV - 176 | ST-199 11/03/2016   | Evaluasi Kinerja PDAM Kabupaten Tapin   | 1  |     |
| 13 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 90 | memperbaiki area-area GCG yang masih memerlukan perbaikan (weakness area) bersama partisipasi GCG   | LAP-557   | ST-804 11/10/2016   | Assessment GCG PD - A (PD PAL Kota Banjarmasin)   | 1  |     |
| 14 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 91 | melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja melalui meningkatkan efisiensi biaya operasi perusahaan, meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikutsertakan pada diklat   | LEV - 387 | ST - 599 01/08/2016 | Evaluasi Kinerja PD - A (PD Baramarta)  | 1  |     |
| 15 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 92 | memperbaiki sistem pengendalian intern dengan membuat kebijakan yang mengatur pimpinan melakukan intervensi, melakukan evaluasi atas ketaatan penerapan SPIP, menyusun rencana strategis yang terpadu dengan penilaian risiko | LEV-409   | ST-601 01/08/2016   | Evaluasi Internal Control BUMD (PDAM Intan Banjar)  | 1  |     |
|    |  |        |    | menetapkan Keputusan Direktur atas Draft Kebijakan Manajemen Risiko   | LBA-534   | ST-802 11/10/2016   | Bimtek SPI BUMD (PDAM Intan Banjar)   |    |     |
|    |  |        |    | menyusun PKAT berpedoman pada SPFAIB, sehingga setiap target kegiatan dapat diukur dan dinilai pencapaiannya  | LEV-542   | ST-809 12/10/2016   | Evaluasi SKAI BPD/BPR - A (Bank Kalsel)   |    |     |
| 16 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | AN     | 93 | melakukan koordinasi dengan kantor pusat Perum Bulog untuk pengklarifikasian kejelasan kepemilikan tanah  | LR - 573  | ST-905 11/11/2016   | Inventarisasi/Clearance Asset pada Perum BULOG (Perum BULOG Divisi Regional Kalimantan Selatan) | 1  |     |
| 17 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | AN     | 94 | meningkatkan kinerja rumah sakit dengan menyediakan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan kedokteran untuk mencapai standar belavanan minimal   | LEV - 221 | ST - 290 8-Apr-16   | Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah - A (RSUD H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong)         | 1  |     |



| No | IKK  |        |    | Rekomendasi   |           |                    |  | TL | Ket     |
|----|--|--------|----|---|-----------|--------------------|--|----|---------|
|    | Uraian   | Bidwas | No | Uraian  | Ref       | ST                 | Judul ST   |    |         |
| 1  | 2  | 3      | 4  | 5   | 6         | 7                  | 8  | 9  | 10      |
|    |  |        |    | meningkatkan kinerja rumah sakit dengan menyediakan sumber daya manusia, anggaran dan peralatan kedokteran untuk mencapai standar pelayanan minimal   | LEV - 215 | ST - 291 8-Apr-16  | Evaluasi Kinerja Rumah Sakit Daerah - B (RSUD H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu)      |    |         |
| 18 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | AN     | 95 | mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam upaya intensifikasi Koordinator Penyuluh masing-masing Kecamatan dalam mensosialisasikan kegiatan subsidi benih dan mendorong petani membeli bibit unggul bersubsidi | LAP-414   | ST-628 11-Aug-16   | Reviu Peningkatan Produksi dan Distribusi Bernih (Padi, Jagung, Kedelai) pada PT Pertani (Persero) | 1  |         |
| 19 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | AN     | 96 | melakukan sosialisasi tentang pemanfaatan lahan/tanah untuk kepentingan umum (pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik).   | LR - 381  | ST - 506 20-Jun-16 | Pemantauan Transmisi/Gardu Induk pada PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng                              | 1  |         |
|    |  |        |    | menghitung estimasi biaya penyelesaian pembangunan pembangkit PLTU Kotabaru   | LR - 282  | ST - 521 27-Jun-16 | Review Progres Pembangunan Pembangkit Listrik PT PLN (Persero) UIP Kalbagteng                      |    |         |
|    |  |        |    |   | 19        |                    |  | 19 | 100,00% |

Target 100%  
Capaian 100,00%

## LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI SASARAN PROGRAM 1 IKU 3

## Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern Pengelolaan Korporasi

| No | IKK   |        |     | Rekomendasi  |                                   |                                |   | TL | Ket |
|----|---|--------|-----|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No  | Uraian   | Ref                               | ST                             | Judul ST  |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4   | 5  | 6                                 | 7                              | 8   | 9  | 10  |
| 1  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 97  | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku                                 | LHAI-433/PW16/5/2016, 20-09-2016  | ST-343/PW16/5/2016, 29-04-2016 | Audit Investigasi atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah oleh DD DAL Banjarmasin        | 1  |     |
| 2  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 98  | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku                        | LAINV-357/PW16/5/2016, 10-08-2016 | ST-368/PW16/5/2016, 11-05-2016 | Audit Investigasi dugaan TPK atas pembangunan Gedung Rumah Sakit Kelas D Pratama di Kecamatan Daba      | 1  |     |
| 3  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 99  | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Banjar agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan selanjutnya   | SR-137/PW16/5/2016, 13-04-2016    | ST-96/PW16/5/2016, 10-02-2016  | PKKN Penerimaan Dana Jasa Pembakaran Sampah Medis dari RS Pertamina Tanjung yang                        | 1  |     |
| 4  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 100 | Direkomendasikan kepada penyidik ___ agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan selanjutnya sesuai                 | SR-85/PW16/5/2016, 11-03-2016     | ST-92/PW16/5/2016, 09-02-2016  | PKKN Pekerjaan Pembangunan Bangsal Bedah dan Bangsal Penyakit Dalam Tahap I RSUD                        | 1  |     |
| 5  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 101 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Kotabaru agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan selanjutnya | SR-432/PW16/5/2016, 20-09-2016    | ST-369/PW16/5/2016, 11-05-2016 | Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas  | 1  |     |
| 6  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 102 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banjar agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan selanjutnya    | SR-587/PW16/5/2016, 09-12-2016    | ST-708/PW16/5/2016, 06-09-2016 | Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tipikor Dana Hibah                  | 1  |     |
| 7  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 103 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan   | LAINV-482/PW16/5/2016, 19-10-2016 | ST-706/PW16/5/2016, 05-09-2016 | Audit Investigatif atas kasus dugaan TPK penyalahgunaan bantuan bibit kelapa sawit dari Dinas Kabupaten | 1  |     |
| 8  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 104 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan           | SR-645/PW16/5/2016, 29-12-2016    | ST-934/PW16/5/2016, 21-11-2016 | Audit dalam rangka PKKN atas Dugaan TPK penggunaan dan pertanggungjawaban Keuangan                      | 1  |     |
| 9  | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 105 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan   | LHAI-644/PW16/5/2016, 29-12-2016  | ST-801/PW16/5/2016, 07-10-2016 | Audit Investigatif atas dugaan Penyalahgunaan dalam Pengelolaan Keuangan pada RSUD                      | 1  |     |
| 10 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 106 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan    | ND-133/INV/XII/2016, 28-12-2016   | ST-786/PW16/5/2016, 07-10-2016 | Audit Investigatif atas Kerugian Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD pada Sekretariat DPRD Prov         | 1  |     |
| 11 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 107 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Paringin agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan          | ND-1/INV/I/2016, 19-01-2016       | ST-13/PW16/5/2016, 11-01-2016  | PKA Penyimpangan Dana APBD Tahun 2014 dalam Program Pembinaan dan Pemasyarakatan                        | 1  |     |
| 12 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 108 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memalihkan     | LKA-79/PW16/5/2016, 08-03-2016    | ST-127/PW16/5/2016, 19-02-2016 | PKA Pengadaan Alat Laboratorium di UNLAM TA 2011 dengan terdakwa Harry Suryanto                         | 1  |     |
| 13 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 109 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memalihkan     | LKA-78/PW16/5/2016, 04-03-2016    | ST-144/PW16/5/2016, 25-02-2016 | PKA pada Sidang atas Kasus Belanja Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum (Buku Tematik dan               | 1  |     |
| 14 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 110 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan agar keterangan ahli yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan             | ND-26/INV/III/2016, 21-03-2016    | ST-148/PW16/5/2016, 25-02-2016 | Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa pekerjaan pengumpulan areal panglekalan dan             | 1  |     |
| 15 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 111 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memalihkan     | LKA-103/PW16/5/2016, 20-03-2016   | ST-168/PW16/5/2016, 04-03-2016 | Pemberian Keterangan Ahli Dugaan TPK Penyaluran Dana BOS dan POMM pada Dinas Pendidikan                 | 1  |     |
| 16 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 112 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memalihkan     | LKA-106/PW16/5/2016, 29-03-2016   | ST-198/PW16/5/2016, 11-03-2016 | Pemberian Keterangan Ahli atas Pekerjaan Pengukuran Areal Pangkalan dan Bandara Ujan                    | 1  |     |

| No | IKK   |        |     | Rekomendasi   |                                  |                                 |  | TL | Ket |
|----|---|--------|-----|---|----------------------------------|---------------------------------|--|----|-----|
|    | Uraian                                      | Bidwas | No  | Uraian  | Ref                              | ST                              | Judul ST   |    |     |
| 1  | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                                | 7                               | 8  | 9  | 10  |
| 17 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 113 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Tanah Laut agar keterangan ahli yang disampaikan diadik sebagai bahan pertimbangan dalam tahap         | ND-30/INV/III/2016, 30-03-2016   | ST-228/PW16/5/2016, 21-03-2016  | Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan TPK Pengadaan Alat Peraga Pendidikan (Matematika, Bahasa     | 1  |     |
| 18 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 114 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memajukan   | LKA-199/PW16/5/2016, 10-05-2016  | ST-320/PW16/5/2016, 22-04-2016  | Pemberian Keterangan Ahli Dugaan TPK penyelewengan Dana Bantuan Rehabilitasi /Pembangunan Gedung   | 1  |     |
| 19 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 115 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memajukan   | LKA-201/PW16/5/2016, 10-05-2016  | ST-326/PW16/5/2016, 26-04-2016  | Pemberian Keterangan Ahli atas dugaan TPK Perbaikan Lapangan Muriani di Dinas Kesehatan dan        | 1  |     |
| 20 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 116 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memajukan   | LKA-17/PW16/5/2016, 20-01-2016   | ST-20/PW16/5/2016, 13-01-2016   | PKA pada Sidang Pra Peradilan atas Kasus Penyalahgunaan Pengelolaan Keuangan Dana APBD yang        | 1  |     |
| 21 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 117 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banjarbaru agar keterangan ahli yang disampaikan diadik sebagai bahan pertimbangan dalam tahap          | ND-2/INV/1/2016, 25-02-2016      | ST-40/PW16/5/2016, 19-01-2016   | PKA atas Kasus Penyimpangan Perbaikan Lapangan Murjani di Dinas Kesehatan dan Pertamanan           | 1  |     |
| 22 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 118 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan agar keterangan ahli yang disampaikan diadik sebagai bahan pertimbangan dalam tahap | ND-10/INV/II/2016, 10-02-2016    | ST-91/PW16/5/2016, 05-02-2016   | PKA pada penyidik Kepolisian pada Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Jalur Jalan Tenaga | 1  |     |
| 23 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 119 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memajukan   | LKA-200/PW16/5/2016, 20-05-2016  | ST-344/PW16/5/2016, 29-04-2016  | Pemberian Keterangan Ahli Dugaan TPK Pengadaan Sepedboot Rawa pada Distrik Kab HST TA 2012         | 1  |     |
| 24 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 120 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat membuat terang suatu perkara dan dapat memajukan   | LKA-202/PW16/5/2016, 10-05-2016  | ST-346/PW16/5/2016, 04-05-2016  | Pemberian Keterangan Ahli dugaan TPK Penyimpangan Dana APBD Th 2014 dalam Program Pembinaan        | 1  |     |
| 25 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 121 | Direkomendasikan kepada Manajemen RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin agar senantiasa dapat mengaplikasikan penerapan kebijakan Fraud Control       | LBA-359/PW16/5/2016, 10-08-2016  | ST-313/PW16/5/2016, 15-04-2016  | Bimtek Fraud Control Plan di RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin                             | 1  |     |
| 26 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 122 | Direkomendasikan kepada Manajemen RSUD Ratu Zalecha Martapura agar mengimplementasikan kebijakan malpraktek yang terintegrasi, membantuk tim              | LBA-379/PW16/5/2016, 29-08-2016  | ST-420/PW16/5/2016, 24-05-2016  | Fraud Control Plan Bimbingan Teknis FCP RSUD Ratu Zalecha Martapura                                | 1  |     |
| 27 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 123 | Direkomendasikan kepada IAIN Antasari Banjarmasin agar meningkatkan pemahaman program anti korupsi dalam rangka meminimalisir terjadinya korupsi          | LS-431/PW16/5/2016, 20-09-2016   | ST-666/PW16/5/2016, 24-08-2016  | Sosialisasi PAK pada IAIN Antasari Banjarmasin   | 1  |     |
| 28 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 124 | Agar meningkatkan informasi/kompetensi atas bidang keinvestigasian.   | ND-122a/INV/XI/2016, 25-11-2016  | ST-859/PW16/5/2016, 27-10-2016  | Forum Investigasi Tahun 2016 di Bandung  | 1  |     |
| 29 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 125 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku                              | LHAI-179/PW16/5/2016, 26-04-2016 | ST-16/PW16/5/2016, 12-01-2016   | Audit Investigatif atas Pengadaan dan Pemasangan Jaringan Pipa Air Limbah oleh Perusahaan Daerah   | 1  |     |
| 30 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 126 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi agar hasil audit yang disampaikan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap selanjutnya sesuai   | SR-216/PW16/5/2016, 03-05-2016   | ST-195/PW16/5/2016, 11-03-2016  | Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pembangunan Gedung OK pada            | 1  |     |
| 31 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 127 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin agar hasil audit yang disampaikan diadik sebagai bahan pertimbangan dalam tahap             | SR-448/PW16/5/2016, 28-09-2016   | ST-688/PW16/5/2016, 31-08-2016  | Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Kegiatan Pengadaan dan          | 1  |     |
| 32 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 128 | Direkomendasikan kepada Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar menindaklanjuti hasil audit sesuai ketentuan yang berlaku                           | LHAI-646/PW16/5/2016, 02-12-2016 | ST-990/PW16/5/2016, 02-12-2016  | Audit Investigatif atas Penggunaan Dana Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah   | 1  |     |
| 33 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP | INV    | 129 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar agar keterangan ahli yang disampaikan diadik sebagai bahan pertimbangan                | ND-130/INV/XII/2016, 23-12-2016  | ST-1039/PW16/5/2016, 16-12-2016 | PKA atas dugaan Tipikor Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjar pada KPU Kab. Banjar   | 1  |     |

| No | IKK  |        |     | Rekomendasi  |                                    |                                |   | TL | Ket     |
|----|--|--------|-----|--|------------------------------------|--------------------------------|---|----|---------|
|    | Uraian   | Bidwas | No  | Uraian   | Ref                                | ST                             | Judul ST  |    |         |
| 1  | 2  | 3      | 4   | 5  | 6                                  | 7                              | 8   | 9  | 10      |
| 34 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 130 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat <del>membuat terang suatu perkara dan dapat memaklumkan</del> | LKA-80/PW16/5/2016, 19-02-2016     | ST-126/PW16/5/2016, 19-02-2016 | PKA sidang Pengadaan Alat Laboratorium di UNLAM TA 2011 dengan terdakwa Dr. Ir Suabrial     | 1  |         |
| 35 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 131 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat <del>membuat terang suatu perkara dan dapat memaklumkan</del> | LKA-126/PW16/5/2016, 04-04-2016    | ST-226/PW16/5/2016, 21-03-2016 | Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan TPK Pengadaan Ternak Korbau di Hulu Sungai Utara oleh | 1  |         |
| 36 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 132 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan agar keterangan ahli yang <del>dicampakan dijadikan sebagai bahan pertimbangan</del>          | ND-35/INV/IV/2016, 07-04-2016      | ST-256/PW16/5/2016, 31-03-2016 | Pemberian Keterangan Ahli atas dugaan Tipikor Pekerjaan Pembangunan Bangsal Badah dan       | 1  |         |
| 37 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 133 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Rantau agar keterangan ahli yang disampaikan <del>dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap</del>           | ND-34/INV/IV/2016, 07-04-2016      | ST-267/PW16/5/2016, 04-04-2016 | Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan Tipikor Penyimpangan Pengelolaan dan Penatausahaan    | 1  |         |
| 38 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 134 | Direkomendasikan kepada penyidik Kepolisian Resort Banjar agar keterangan ahli yang disampaikan <del>dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap</del>          | ND-47/INV/V/2016, 27-05-2016       | ST-370/PW16/5/2016, 11-05-2016 | Pemberian Keterangan Ahli kasus Dugaan Tipikor atas penerimaan dana iasa pembakaran sampah  | 1  |         |
| 39 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 135 | Direkomendasikan kepada para pihak penanggungjawab untuk melaksanakan hasil risalah yang telah disepakati dalam rangka <del>penanganan</del>                         | LHEHKP-399/PW16/5/2016, 09-08-2016 | ST-563/PW16/5/2016, 21-07-2016 | Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Penyelesaian Penggantian Cudang Millik Stasiun     | 1  |         |
| 40 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 136 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin agar keterangan ahli yang disampaikan <del>dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap</del>      | ND-122/INV/XI/2016, 25-11-2016     | ST-939/PW16/5/2016, 21-11-2016 | PKA atas dugaan Tipikor Penyimpangan Pengadaan dan Pemecangan Laringan Dina Air             | 1  |         |
| 41 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 137 | Direkomendasikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Kotabaru agar keterangan ahli yang disampaikan <del>dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam tahap</del>         | ND-123/INV/XI/2016, 30-11-2016     | ST-936/PW16/5/2016, 21-11-2016 | PKA atas kasus dugaan Tipikor Pekerjaan Pengadaan Pakaian LINMAS SATPOL PP Kabupaten        | 1  |         |
| 42 | Rekomendasi Pengawasan oleh Perwakilan BPKP        | INV    | 138 | Direkomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum agar keterangan ahli yang disampaikan di persidangan dapat <del>membuat terang suatu perkara dan dapat memaklumkan</del> | LKA-545/PW16/5/2016, 21-11-2016    | ST-882/PW16/5/2016, 4-11-2016  | PKA atas kasus TPK Program Pamsimas Desa Cantung Kabupaten Kotabaru                         | 1  |         |
| 43 | Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita) | INV    | 139 | Agar hasil kajian pengawasan menjadi dasar meningkatnya kinerja bidang investigasi.  | LAP-255/PW16/5/2016, 20-06-2016    | ST-286/PW16/5/2016, 07-04-2016 | Kajian Hasil Pengawasan Dana Bansos Periode Tahun 2011 - April 2016                         | 1  |         |
|    |  |        | 43  |  |                                    |                                |   | 43 | 100,00% |

Target 60%  
Capaian 166,67%

**LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI SASARAN PROGRAM 2 IKU 1  
Maturitas SPIP Pemerintah Kabupaten/Kota (level 3)**

| No | IKK  |        |     | Rekomendasi  |         |     |            | TL  | Ket |  |
|----|--|--------|-----|--|---------|-----|------------|---|-----|--|
|    | Uraian   | Bidwas | No  | Uraian   | Ref     | ST  | Judul ST   |   |     |  |
| 1  | 2  | 3      | 4   | 5  | 6       | 7   | 8          | 9   | 10  |  |
| 1  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD    | 140 | Menyusun kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan secara formal   | LEV-209 | 171 | 04/03/2016 | Penilaian (Assesment) Maturitas SPIP pada Pemkab. Tanah Bumbu   |     |  |
| 2  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD    | 141 | Seluruh pimpinan unit organisasi perlu melaksanakan proses identifikasi risiko dan membuat dokumen identifikasi risiko serta melaksanakan proses analisis risiko atas risiko-risiko yang mungkin terjadi yang menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan dari masing masing unit kerja. Disamping itu juga harus merumuskan aktivitas pengendalian yang diperlukan sesuai hasil analisis risiko. | LAP-198 | 240 | 23/03/2016 | Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  |     |  |
| 3  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD    | 142 | Menyusun kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) dan kebijakan/pedoman penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan secara formal, dan melaksanakan serta mendokumentasikan pemanfaatan penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah   | LEV-377 | 496 | 15/06/2016 | Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kota Banjarbaru  |     |  |
| 4  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD    | 143 | Menyusun kebijakan/pedoman penilaian risiko yang ditetapkan secara formal, yang meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko dan melaksanakan serta mendokumentasikan pemanfaatan penilaian risiko dan efektivitas pemantauan yang berkelanjutan untuk menentukan lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah  | LEV-474 | 498 | 15/06/2016 | Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah   |     |  |
| 5  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD    | 144 | Seluruh pimpinan unit organisasi perlu melaksanakan proses analisis risiko pada unit kerjanya untuk merancang tindakan pengendalian yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan instansi dari masing-masing unit kerja, serta menyusun kegiatan pengendalian berdasarkan atas hasil identifikasi dan analisis risiko dari masing-masing unit.   | LEV-412 | 497 | 15/06/2016 | Penilaian Maturitas SPIP pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru   |     |  |
| 6  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD    | 145 | Melaksanakan rencana pengendalian yang akan diterapkan atas risiko yang ada  | LPM-581 | 952 | 24/11/2016 | Bimbingan Teknis Penilaian Risiko atas Implementasi Best Practices di Bidang ULP, dan Penyelenggaraan PTSP pada Pemerintah Kabupaten Banjar |     |  |

|   |  |     |     |  |         |     |            |  |   |  |
|---|--|-----|-----|--|---------|-----|------------|--|---|--|
| 7 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 146 | <p>Bidang Pengelolaan APBD dan Hibah/Bansos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dalam APBD pada saat musrenbang RKPD sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP No 8 tahun 2008 dan Permendagri No 54 tahun 2010 serta meminta kedua belah pihak mentaati Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 dalam melakukan pembahasan anggaran untuk Tahun Anggaran 2015 dan seterusnya.</li> <li>2. Bupati Tanah Laut agar membuat Surat penegasan Kepala Daerah untuk pembatasan pemberian hibah yang dikatakan "secara terus menerus".</li> <li>3. LSM Merah Putih untuk merealisasikan kegiatan bedah rumah yang belum terlaksana.</li> </ol>   | LPM-554 | 867 | 31/10/2016 | Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Korsupgah Korupsi Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | 1 |  |
| 8 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 147 | <p>BIDANG PENGELOLAAN APBD DAN HIBAH/BANSOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Kabupaten Tapin dan DPRD mengusulkan kegiatan yang akan dibiayai dalam APBD pada saat musrenbang RKPD atau memasukkan kegiatan tersebut pada Rancangan KUA/PPAS sesuai mekanisme yang ada dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Permendagri No 13 Tahun 2006 serta perubahannya.</li> <li>2. Bupati Tapin agar mencantumkan daftar penerima, alamat dan besaran hibah dan bansos yang diterima pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, individu, organisasi dan kelompok masyarakat dalam Lampiran III dan Lampiran IV Perkada Penjabaran APBD.</li> </ol> <p>BIDANG PENDAPATAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bupati Tapin agar membuat aturan lebih lanjut tentang Pemeriksaan Pajak Daerah</li> <li>2. Menyusun aturan sebagai petunjuk pelaksanaan Perda 14 Tahun 2012 khusus mengenai pajak reklame.</li> </ol> <p>BIDANG PENGADAAN BARANG JASA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) barang/jasa Pemkab Tapin untuk menghapus/ tidak mencantumkan klausul yang mewajibkan SKPD mengajukan permohonan pelaksanaan lelang kepada Bupati Tapin pada Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Kepala KLP barang/jasa Pemkab Tapin dengan Kepala SKPD, untuk mendapatkan persetujuan Bupati sebelum dokumen lelang diserahkan ke Kantor Layanan Pengadaan.</li> <li>2. Melakukan identifikasi kebutuhan BMD dengan baik agar <del>pendayagunaan barang daerah secara maksimal dapat diwujudkan</del></li> </ol> | LPM-553 | 867 | 31/10/2016 | Monitoring dan Evaluasi Hasil Tindak Lanjut Korsupgah Korupsi Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Tapin dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut | 1 |  |

|    |  |     |     |   |         |     |            |  |   |  |
|----|--|-----|-----|---|---------|-----|------------|--|---|--|
| 9  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 148 | Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk mempertegas komitmen masing-masing SKPD dalam melakukan rencana aksi tindak lanjut atas temuan BPK-RI, dan SKPD terkait agar segera melaksanakan rencana aksi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Pemerintah Kota Banjarbaru TA 2015 sesuai target waktu yang telah disepakati dalam berita acara kesepakatan                            | LBA-463 | 714 | 07/09/2016 | Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada Pemkab Banjarbaru | 1 |  |
|    |  |     |     | Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk mempertegas komitmen masing-masing SKPD dalam menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut atas temuan BPK-RI tahun 2015, dan SKPD terkait agar segera melaksanakan rencana aksi tindak lanjut temuan hasil audit BPK-RI atas LKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 sesuai target waktu yang telah disepakati dalam berita Acara Kesepakatan           | LBA-391 | 594 | 29/07/2016 | Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada Pemkab Kotabaru   | 1 |  |
|    |  |     |     | Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk mempertegas komitmen masing-masing SKPD dalam menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut atas temuan BPK-RI tahun 2015, dan SKPD terkait agar segera melaksanakan rencana aksi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LPKD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 sesuai target waktu yang telah disepakati dalam berika acara kesepakatan     | LBA-429 | 646 | 18/08/2016 | Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada Pemkab Tabalong   | 1 |  |
| 10 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 149 | Melakukan rapat koordinasi dengan SKPD terkait untuk mempertegas komitmen masing-masing SKPD dalam menindaklanjuti rencana aksi tindak lanjut atas temuan BPK tahun 2015, dan SKPD terkait agar segera melaksanakan rencana aksi tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2015 sesuai target waktu yang telah disepakati dalam berita Acara Kesepakatan. | LBA-426 | 653 | 19/08/2016 | Bimtek Penyusunan Rencana Aksi atas Temuan Pemeriksaan BPK-RI pada Pemkab Balangan   | 1 |  |

|    |  |     |     |   |         |     |            |  |   |  |
|----|--|-----|-----|---|---------|-----|------------|--|---|--|
| 11 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 150 | Melakukan perbaikan pada BAB IV Visi Misi Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan dengan:<br>a. Penyajian renstra RSUD Ratu Zalecha memperhatikan keselarasan antara misi, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan RSUD termasuk juga memperhatikan keselarasan indikator-indikator yang digunakan baik indikator kinerja tujuan maupun indikator kinerja sasaran strategis<br>b. Tujuan yang ditetapkan sebagai penjabaran visi misi dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan beserta target capaiannya pada akhir periode Renstra<br>c. Menjelaskan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran strategis secara rinci meliputi definisi dan cara perhitungan, agar lebih jelas maksudnya<br>d. Memasukkan kembali semua indikator kinerja utama sesuai Keputusan Direktur Nomor 160 Tahun 2015 jumlah IKU ke dalam | LBA-537 | 794 | 05/10/2016 | Asistensi Perencanaan Pembangunan pada RSUD Ratu Zalecha Kabupaten Banjar melalui reviu Renstra tahun 2017 sampai dengan 2022. |   |  |
| 12 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 151 | Bidang Aset BPKAD Kota Banjarmasin perlu segera melakukan update aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7.5 untuk menghasilkan perhitungan penyusutan secara otomatis dari aplikasi SIMDA BMD.  | LBA-121 | 189 | 08/03/2016 | Pendampingan Aplikasi SIMDA BMD pada Pemko Banjarmasin   | 1 |  |
| 13 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 152 | Tim pengembang aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan Tanah Bumbu melakukan koordinasi dengan Tim Pengembang SIMDA BPKP Pusat.   | LAP-262 | 485 | 13/06/2016 | Pengembangan Aplikasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu  | 1 |  |
| 14 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 153 | Bidang Akuntansi DPPKAD Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu melakukan verifikasi atas mapping rekening akrual pada menu parameter aplikasi SIMDA Keuangan dan verifikasi data yang diinput oleh peserta pada Aplikasi SIMDA Keuangan, yaitu saldo awal, jurnal balik dan jurnal penyesuaian.  | LBA-351 | 595 | 29/07/2016 | Workshop Laporan Keuangan Berbasis Akrual dengan SIMDA Keuangan pada Pemkab HSS  | 1 |  |
| 15 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 154 | DPPKAD Kabupaten Balangan mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk keperluan implementasi aplikasi SIMDA Pendapatan pada Kabupaten Balangan  | ND-76   | 295 | 12/04/2016 | Fasilitator Sosialisasi SIMDA Pendapatan pada Pemkab. Balangan   | 1 |  |
| 16 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 155 | Diperlukan pelatihan lanjutan minimal 2 hari untuk melatih perangkat desa dalam melakukan penatausahaan anggaran, pertanggungjawaban serta pelaporan.   | ND-34   | 82  | 02/02/2016 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa kepada Aparatur Kecamatan dengan Aplikasi SIMDA (Siskeudes) pada Kab. Hulu Sungai Utara    | 1 |  |
|    |  |     |     | Guna mengeliminasi keterlambatan dalam pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan desa serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, maka perlu dipastikan bahwa peserta pelatihan benar-benar siap untuk mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes sesuai peraturan yang berlaku.  | LBA-442 | 592 | 29/07/2016 | Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa dan Narasumber Pelatihan SISKEUDES kepada Aparat Desa di Kab. HSS                          | 1 |  |
|    |  |     |     | Seluruh desa yang menjadi peserta pelatihan diharapkan dapat mengelola keuangan desa menggunakan aplikasi Siskeudes sesuai peraturan yang berlaku di daerah masing-masing untuk tahun 2016.   | LBA-471 | 719 | 09/09/2016 | Bimtek Implementasi SIMDA Desa pada Desa di Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala   |   |  |



|    |  |     |     |   |                     |        |            |   |    |        |
|----|--|-----|-----|---|---------------------|--------|------------|---|----|--------|
| 17 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 156 | (LEV-160):<br>Kepala Desa Ambungan Kecamatan Pelaihari agar memperbaiki dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2015 agar tertib dan lengkap dengan dipandu oleh Inspektorat Kabupaten Tanah Laut<br>(LEV-161):<br>Kepala Desa Bumi Jaya Kecamatan Pelaihari agar:<br>1. Melaksanakan kegiatan dana desa secara swakelola dengan pola padat karya dan meminimalisasi pelaksanaan kegiatan secara kontraktual<br>2. Segera membuat as built drawing untuk kegiatan pembuatan | LEV-160,<br>LEV-161 | 282    | 06/04/2016 | Evaluasi Dana Desa (APBN) Tahun 2015 pada Kabupaten Tanah Laut        |    |        |
| 18 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 157 | Inspektur agar melakukan monitoring atas rekonsiliasi saldo piutang pajak dan retribusi per 31 Desember 2015 pada Dinas Pendapatan serta Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pengelolaan Pasar dan melakukan monitoring atas rekonsiliasi aset tetap pada Aplikasi BMD sesuai dengan saldo hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Tahun 2015   | LBA-425             | 722    | 13/09/2016 | Bimtek Reviu LKPD Berbasis Akrual pada Inspektorat Kabupaten Tabalong | 1  |        |
| 19 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | APD | 158 | Target jangka menengah dalam dokumen RPJMD/Renstra agar dimonitor pencapaiannya secara berkala dan diinformasikan dalam laporan kinerja tahunan serta seluruh SKPD agar menyusun dan menetapkan ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya dan melakukan pemantauan pencapaiannya secara berkala serta memanfaatkannya sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment   | LEV-603             | 554    | 19/07/2016 | Evaluasi SAKIP pada Pemkab Hulu Sungai Tengah                         | 1  |        |
| 20 | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | IPP | 159 | Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan koordinasi dengan BKKBN Pusat dengan menyurati BKKBN Pusat atas saldo alokasi yang dibawah rasio stock   | LEV-375             | ST-566 | 22/06/2016 | Evaluasi atas Penyelenggaraan Fungsi PTSP-PM di Kabupaten Banjar      | 0  |        |
|    |  |     |     | Mengupayakan mengusulkan ketersediaan anggaran pelatihan bagi tenaga PLKB   |                     |        |            |   |    |        |
|    |  |     |     | Mengupayakan mengusulkan pelatihan pelayanan KB bagi dokter yang belum pelatihan  |                     |        |            |   |    |        |
|    |  |     |     | Mengupayakan dan mengusulkan ketersediaan anggaran pelatihan pelayanan KB bagi bidan yang belum mendapat pelatihan Implan dan IUD   |                     |        |            |   |    |        |
|    |  |     |     | 20  |                     |        |            |   | 14 | 70,00% |

**LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI SASARAN PROGRAM 2 IKU 2**  
**Persentase BUMD yang Kinerjanya Minimal Berpredikat Baik dari BUMD yang Dibina**

| No | IKK  |        |     | Rekomendasi   |           |          |            | TL  | Ket |         |
|----|--|--------|-----|---|-----------|----------|------------|---|-----|---------|
|    | Uraian   | Bidwas | No  | Uraian  | Ref       | ST       | Judul ST   |   |     |         |
| 1  | 2  | 3      | 4   | 5   | 6         | 7        | 8          | 9   | 10  |         |
| 1  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 160 | menetapkan Keputusan Direktur atas Draft pedoman penatausahaan aset tetap   | LBA-469   | ST-716   | 08/09/2016 | Asistensi/Bimtek Management Asset PDAM (PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara) | 1   |         |
| 2  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 161 | mengimplementasikan GCG pada perusahaan   | LBA - 83  | ST-122   | 17/02/2016 | Bimtek GCG BUMD - A (PD Pasar Bauntung Batuah)                            | 1   |         |
| 3  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 162 | mengimplementasikan GCG pada perusahaan   | LBA-315   | ST - 457 | 03/06/2016 | Bimtek GCG BUMD - C (PDAM Kabupaten Balangan)                             | 1   |         |
| 4  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 163 | memanfaatkan profil BUMD/BUMD untuk perencanaan penugasan   | ND - 55   | ST-204   | 11/03/2016 | Analisis BUMD dan BLUD 2016   | 1   |         |
| 5  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 164 | Mengoptimalkan SPI dalam meningkatkan pengendalian intern.  | LR-567    | ST-919   | 02/12/2016 | Reviu atas Laporan Verifikasi Hibah Air Minum pada PDAM Kab. Tapin        | 1   |         |
| 6  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 165 | memanfaatkan RBA RSUD Kotabaru dalam pelaksanaan anggaran   | LBA - 124 | ST - 222 | 17/03/2016 | Asistensi/Bimtek RBA BLUD - A (RSUD Kotabaru Kabupaten Kotabaru)          | 1   |         |
| 7  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 166 | menilai kesesuaian pemasangan sambungan rumah dengan data baseline survey dan menilai kelayakan sambungan rumah yang dibangun | LR-559    | ST-917   | 16/11/2016 | Reviu/Verifikasi Hibah Air Minum (PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara)       | 1   |         |
|    |  |        |     |   | 7         |          |            |   | 7   | 100,00% |

**LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI SASARAN PROGRAM 2 IKU 3**  
**Presentase BLUD yang Kinerjanya Minimal Baik dari BLUD yang Dibina**

| No | IKK  |        |     | Rekomendasi  |           |          |            | TL  | Ket |         |
|----|--|--------|-----|--|-----------|----------|------------|---|-----|---------|
|    | Uraian   | Bidwas | No  | Uraian   | Ref       | ST       | Judul ST   |   |     |         |
| 1  | 2  | 3      | 4   | 5  | 6         | 7        | 8          | 9   | 10  |         |
| 1  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 167 | mengimplementasikan SIA dan Billing System pada PDAM Tanah Laut  | LBA-50    | ST-71    | 29/01/2016 | Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD (RSUD H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong)  | 1   |         |
| 2  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 168 | Mengoptimalkan SPI RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan dalam meningkatkan pengendalian intern pada rumah sakit.                         | LBA-599   | ST-949   | 24/11/2016 | Pengembangan Tata Kelola BLUD (Good Agency Governance) (RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan) | 1   |         |
| 3  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 169 | memanfaatkan RBA RSUD Kotabaru dalam pelaksanaan anggaran  | LBA - 124 | ST - 222 | 17/03/2016 | Asistensi/Bimtek RBA BLUD - A (RSUD Kotabaru Kabupaten Kotabaru)  | 1   |         |
| 4  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 170 | mengimplementasikan dokumen RSB sebagai dasar anggaran dan kinerja Puskesmas Banjarbaru Utara  | LBA-356   | ST - 424 | 24/05/2016 | Asistensi/Bimtek RSB BLUD (Puskesmas Banjarbaru Utara Dinkes Kota Banjarbaru)   | 1   |         |
| 5  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 171 | mengimplementasikan SIA pada RSUD  | LBA-60    | ST-68    | 29/01/2016 | Asistensi/Bimtek Implementasi SIA BLUD (RSUD H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong)  | 1   |         |
| 6  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 172 | mengimplementasikan Dokumen Pola Tata Kelola sebagai dasar operasional puskesmas sebagaimana mestinya                                      | LBA-317   | ST - 330 | 26/04/2016 | Asistensi/Bimtek PTK BLUD (Puskesmas Banjarbaru Utara)  | 1   |         |
| 7  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 173 | menyelaraskan program dan kegiatan yang tercantum di RBA Puskesmas Cempaka dengan program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | LBA-373   | ST - 597 | 01/08/2016 | Asistensi/Bimtek RBA BLUD - B (Puskesmas Cempaka Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru)   | 1   |         |
| 8  | Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting) | AN     | 174 | mengimplementasikan Dokumen Standar Pelayanan Minimal sebagai dasar operasional puskesmas sebagaimana mestinya                             | LBA-318   | ST - 350 | 09/05/2016 | Asistensi/Bimtek SPM BLUD (Puskesmas Banjarbaru Utara Dinkes Kota Banjarbaru)   | 1   |         |
|    |  |        | 8   |  |           |          |            |   | 8   | 100,00% |

**LAMPIRAN RINCIAN REKOMENDASI SASARAN PROGRAM 3**  
**Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah Daerah**

| No | IKK   |        |     | Rekomendasi   |                          |         |            | TL   | Ket |        |
|----|---|--------|-----|---|--------------------------|---------|------------|--|-----|--------|
|    | Uraian  | Bidwas | No  | Uraian  | Ref                      | ST      | Judul ST   |  |     |        |
| 1  | 2   | 3      | 4   | 5   | 6                        | 7       | 8          | 9  | 10  |        |
|    | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda | P3A    | 175 | 1. Menyusun perubahan atas Perbup tentang Sisdurwas;<br>2. Memperbaiki Peta kompetensi;<br>3. <i>Peer review</i> antar APIP akan dibicarakan pada rapat koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Kalimantan Selatan  | LBA-650, tgl 30 Des 2016 | ST-969  | 29/11/2016 | Monitoring Area of Improvement Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Banjar              | 0,5 |        |
| 2  | Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda | P3A    | 176 | 1. Melaksanakan finalisasi dokumen <i>Internal Audit Charter</i> (IAC);<br>2. Menyusun SK Inspektur Kota Banjarmasin mengenai Adi Kinerja yang mengatur tentang mekanisme pemberian reward and punishment kepada pegawai yang berprestasi maupun berkinerja terbaik/teladan, serta SOP perihal tersebut;<br>3. <i>Peer review</i> antar APIP akan dibicarakan pada rapat koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Wilayah Kalimantan Selatan | LBA-651, 30 Des 2016     | ST-1010 | 06/12/2016 | melaksanakan Monitoring Area of Improvement Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kota Banjarmasin | 0,5 |        |
|    |   |        |     |   | 2                        |         |            |  | 1   | 50,00% |

**LAMPIRAN RINCIAN PENILAIAN MATURITAS SPIP**

| NO | NAMA PEMDA                  | EVALUASI SPIP       |             |
|----|-----------------------------|---------------------|-------------|
|    |                             | HASIL EVALUASI SPIP |             |
|    |                             | NILAI               | KATEGORI    |
| 1  | 2                           | 3                   | 4           |
| 1  | Provinsi Kalimantan Selatan | 2,96                | Berkembang  |
| 2  | Kab. Banjar                 | 3,726               | Terdefinisi |
| 3  | Kab. Barito Kuala           |                     |             |
| 4  | Kab. Hulu Sungai Selatan    | 2,38                | Berkembang  |
| 5  | Kab. Hulu Sungai Tengah     | 2,40                | Berkembang  |
| 6  | Kab. Hulu Sungai Utara      |                     |             |
| 7  | Kab. Kota Baru              | 2,42                | Berkembang  |
| 8  | Kab. Tabalong               |                     |             |
| 9  | Kab. Tanah Laut             | 2,48                | Berkembang  |
| 10 | Kab. Tapin                  |                     |             |
| 11 | Kota Banjar Baru            | 2,40                | Berkembang  |
| 12 | Kota Banjarmasin            | 3,21                | Terdefinisi |
| 13 | Kab. Balangan               |                     |             |
| 14 | Kab. Tanah Bumbu            | 2,52                | Berkembang  |

Keterangan:

Skor nilai pada Kabupaten Banjar sebelum dilakukan validasi.

**LAMPIRAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA BUMD**

| <b>No.</b> | <b>Nama BUMD</b>                    | <b>Kategori</b> |
|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1          | PDAM Bandarmasih                    | Sehat           |
| 2          | PDAM Intan Banjar                   | Sehat           |
| 3          | PDAM Kabupaten Tapin                | Sehat           |
| 4          | PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan  | Sehat           |
| 5          | PDAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah   | Sehat           |
| 6          | PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara    | Sehat           |
| 7          | PDAM Kabupaten Balangan             | Sehat           |
| 8          | PDAM Kabupaten Tabalong             | Sehat           |
| 9          | PDAM Kabupaten Tanah Laut           | Kurang Sehat    |
| 10         | PDAM Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu | Sehat           |
| 11         | PDAM Kabupaten Kotabaru             | Kurang Sehat    |
| 12         | PDAM Kabupaten Barito Kuala         | Sehat           |
| 13         | PD Baramarta                        | Cukup           |

**LAMPIRAN PENILAIAN EVALUASI KINERJA BLUD**

| <b>No.</b> | <b>Nama BLUD</b>                                    | <b>Kategori</b> |
|------------|---|-----------------|
| 1          | RSUD H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong       | Baik            |
| 2          | RSUD H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu | Baik            |

**LAMPIRAN RINCIAN PENILAIAN KAPABILITAS**

| <b>NO</b> | <b>NAMA PEMDA</b>           | <b>NILAI</b> | <b>KATEGORI</b> |
|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                    | <b>3</b>     | <b>4</b>        |
| 1         | Provinsi Kalimantan Selatan | 2            | Infrastruktur   |
| 2         | Kab. Banjar                 | 3            | Terintegrasi    |
| 3         | Kab. Barito Kuala           | 1            | <i>Initial</i>  |
| 4         | Kab. Hulu Sungai Selatan    | 2            | Infrastruktur   |
| 5         | Kab. Hulu Sungai Tengah     | 2            | Infrastruktur   |
| 6         | Kab. Hulu Sungai Utara      | 2            | Infrastruktur   |
| 7         | Kab. Kota Baru              | 2            | Infrastruktur   |
| 8         | Kab. Tabalong               | 2            | Infrastruktur   |
| 9         | Kab. Tanah Laut             | 2            | Infrastruktur   |
| 10        | Kab. Tapin                  | 2            | Infrastruktur   |
| 11        | Kota Banjar Baru            | 2            | Infrastruktur   |
| 12        | Kota Banjarmasin            | 3            | Terintegrasi    |
| 13        | Kab. Balangan               | 2            | Infrastruktur   |
| 14        | Kab. Tanah Bumbu            | 2            | Infrastruktur   |